

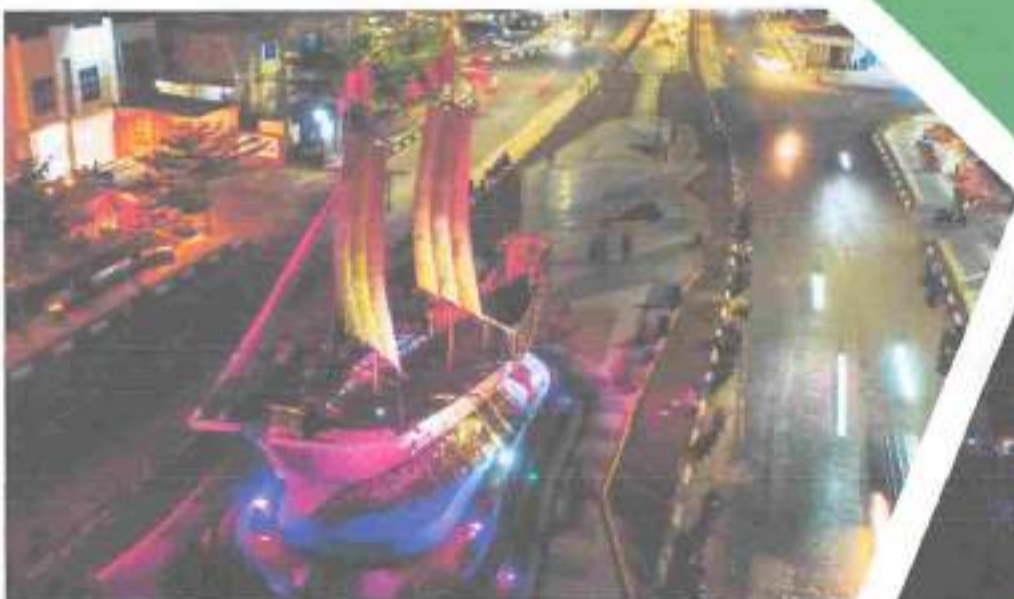


PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Perubahan

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



2023

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : 8/900/741.6/BKAD-SET/2023
160/02/MoU-DPRD/VIII/2023
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Ansar Ahmad, SE., MM
Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor Gubernur Kepulauan Riau di Pulau Dompak - Kota Tanjungpinang

Bertindak sebagai Gubernur Kepulauan Riau selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2. a. Nama : Jumaga Nadeak, SH
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- b. Nama : Rizki Faisal, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- c. Nama : Raden Hari Tjahyono
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- d. Nama : dr. T. Afrizal Dachlan
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Tanjungpinang, 29 Agustus 2023

GOVERNOR KEPUKAWAN RIAU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KEPUKAWAN RIAU

Selaku,
GOVERNOR
KEPUKAWAN RIAU

Selaku,
PIHAK KEDUA

H. ANSAR AHMAD, SE., MM

JUMAGA NADEAK, SH
KETUA

RIZKI FAISAL, SE, MM
WAKIL KETUA

RADEN HARI TJAHYONO
WAKIL KETUA

dr. T. AFRIZAL DACHLAN
WAKIL KETUA

h.1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS Perubahan APBD	1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS Perubahan APBD	2
1.3. Dasar Penyusunan PPAS Perubahan APBD	3
 BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	 7
2.1. Target Perubahan Pendapatan Daerah	8
 BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	 11
3.1. Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	12
3.2. Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	30
3.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	59
 BAB IV PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Masing-masing Urusan, SKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Belanja Daerah	 99
4.1. Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	99
4.2. Perubahan Plafon Anggaran Belanja	239
 BAB V PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	 240
5.1. Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah	240
 BAB VI PENUTUP	 241

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Perubahan Pendapatan Daerah	8
Tabel 3.1	Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	12
Tabel 3.2	Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	30
Tabel 3.3	Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah	59
Tabel 4.1	Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	99
Tabel 4.2	Rincian Perubahan Plafon Anggaran Belanja	239
Tabel 5.1	Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah	240



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS Perubahan APBD

APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023. APBD tahun 2023 tersebut memerlukan perubahan karena terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian dengan adanya regulasi dan kebijakan terbaru.

Berdasarkan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, berupa:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan/atau;
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- (3) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- (4) Keadaan darurat; dan/atau
- (5) Keadaan luar biasa.

Disisi Pendapatan Daerah, terjadi perubahan asumsi sehingga perlu dilakukan penyesuaian, mencakup:

1. Perubahan proyeksi target Pendapatan Asli Daerah.
2. Perubahan proyeksi target Pendapatan Dana Transfer.
3. Perubahan proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Postur



dan Rincian Belanja Tahun Anggaran 2023 berdasarkan pada Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023. Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2023 dilakukan dalam rangka penyesuaian atas:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.
2. Perubahan proyeksi pendapatan daerah dengan memperhitungkan hasil evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Daerah dan Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun anggaran 2022;
3. Adanya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
4. Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
5. Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2023.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) dilakukan guna penyesuaian rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah akibat perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan umum APBD yang berimbas pada perubahan struktur APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023, serta untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS Perubahan APBD

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, dengan memperhatikan perubahan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat;



2. Menyesuaikan penganggaran belanja daerah, dengan memperhatikan perubahan kebijakan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah dan penyesuaian penerimaan SiLPA berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
3. Memberikan landasan untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
4. Memberikan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan Perubahan RKA OPD Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Penyusunan PPAS Perubahan APBD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);



14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 5).



BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, maka rencana pendapatan daerah sebelum perubahan dan rencana pendapatan daerah setelah perubahan yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan KUA dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.



Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

JENIS PENERIMAAN	TAHUN ANGGARAN 2023	R-APBD PERUBAHAN 2023		
	APBD MURNI	R-APBD PERUBAHAN	KENAIKAN	%
1	2	3	4=3-2	5=4/2
PENDAPATAN	4.019.425.727.463,00	4.119.999.719.757,00	100.573.992.294,00	2,50%
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.519.211.737.005,00	1.671.742.919.064,00	152.531.002.059,00	10,11%
A PENDAPATAN PAJAK DAERAH	1.348.177.895.755,00	1.508.733.257.229,00	160.555.361.474,00	11,91%
1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	453.193.710.000,00	471.273.572.040,00	18.079.862.040,00	3,99%
2 Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	300.000.000.000,00	389.870.249.500,00	89.870.249.500,00	29,96%
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	420.000.000.000,00	472.605.249.934,00	52.605.249.934,00	12,53%
4 Pajak Air Permukaan (PAP)	1.053.500.000,00	1.053.500.000,00	0,00	0,00%
5 Pajak Rokok	173.930.685.755,00	173.930.685.755,00	0,00	0,00%
B HASIL RETRIBUSI DAERAH	16.658.831.254,00	16.658.831.254,00	0,00	0,00%
1 Retribusi Jasa Usaha	6.810.831.254,00	6.360.831.254,00	(450.000.000,00)	-6,61%
a Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium - Keswan	385.387.254,00	385.387.254,00	0,00	0,00%
b Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Asrama Haji (BPKAD)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00%
c Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium DKP & BBI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00%
d Retribusi Jasa Kepelabuhan (DKP Antang)	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00%
e Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium - PU	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00%
f Retribusi Jasa Kepelabuhan (Dishub)	3.000.000.000,00	2.201.792.000,00	(798.208.000,00)	-26,61%
g Retribusi Pemanfaatan Ruang Laut (DKP)	-	34.320.000,00	34.320.000,00	100,00%
h Retribusi Pemakaian Ruang dan ATM (Bapenda)	200.000.000,00	63.000.000,00	(137.000.000,00)	-68,50%
i Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Menara Telekom Kominfo	225.444.000,00	676.332.000,00	450.888.000,00	200,00%
2 Retribusi Perizinan Tertentu	9.848.000.000,00	10.298.000.000,00	450.000.000,00	4,57%
a Pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00%
b Retribusi Izin Usaha Perikanan (DKP) PTSP Perikanan	1.050.000.000,00	1.500.000.000,00	450.000.000,00	42,86%
c Retribusi Izin Bidang Perhubungan	798.000.000,00	798.000.000,00	0,00	0,00%
C HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	18.300.000.000,00	18.300.000.000,00	0,00	0,00%
1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah	18.300.000.000,00	18.300.000.000,00	0,00	0,00%
a Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00%
b Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BUP	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00%



JENIS PENERIMAAN	TAHUN ANGGARAN 2023	R-APBD PERUBAHAN 2023		
	APBD MURNI	R-APBD PERUBAHAN	KENAIKAN	%
1	2	3	4=3-2	5=4/2
D LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	135.075.000.000,00	128.050.731.181,00	(7.024.268.819,00)	-5,20%
1 Penerimaan Jasa Giro	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	-33,33%
a Jasa Giro Kas Daerah	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	-33,33%
2 Penerimaan Denda Pajak	20.075.000.000,00	18.050.731.181,00	(2.024.268.819,00)	-10,08%
a Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	500.000,00	(59.500.000,00)	-99,17%
b Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000.000,00	17.810.131.181,00	(2.189.868.819,00)	-10,95%
c Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	239.800.000,00	229.800.000,00	2298,00%
d Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	5.000.000,00	300.000,00	(4.700.000,00)	-94,00%
3 Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit (BLUD)	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00%
a RSUD Provinsi Tg.Uban) RSUD Engku Haji Daud	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00%
b RSUD Provinsi Tg.Pinang) RSUP Raja Ahmad Tabib	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00	0,00%
2 PENDAPATAN TRANSFER	2.499.889.897.954,00	2.446.978.180.092,00	(52.911.717.862,00)	-2,12%
A DANA BAGI HASIL (DBH)	771.308.861.954,00	719.006.267.807,00	(52.302.594.147,00)	-6,78%
1 Bagi Hasil Pajak	247.307.003.644,00	201.010.282.821,00	(46.296.720.823,00)	-18,72%
a Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	24.997.460.637,00	23.034.256.001,00	(1.963.204.636,00)	-7,85%
b Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	222.271.718.007,00	177.817.848.683,00	(44.453.869.324,00)	-20,00%
c Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	37.825.000,00	158.178.137,00	120.353.137,00	318,18%
2 Bagi Hasil Sumber Daya Alam	524.001.858.310,00	517.995.984.986,00	(6.005.873.324,00)	-1,15%
a Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	662.641.323,00	528.726.091,00	(133.915.232,00)	-20,21%
b Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	12.605.426.273,00	10.906.567.064,00	(1.698.859.209,00)	-13,48%
c Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	510.733.790.714,00	506.560.691.831,00	(4.173.098.883,00)	-0,82%
- Minyak Bumi 15% + 0,5 %	17.161.475.675,00	46.960.027.857,00	29.798.551.982,00	173,64%
- Gas Alam 30% + 0,5 %	493.572.314.839,00	459.600.663.974,00	(33.971.650.865,00)	-6,88%
B DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.131.182.073.000,00	1.131.182.073.000,00	0,00	0,00%
1 Dana Alokasi Umum	1.131.182.073.000,00	1.131.182.073.000,00	0,00	0,00%
C DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	597.398.963.000,00	596.789.839.285,00	(609.123.715,00)	-0,10%
1 DAK Fisik	313.990.759.000,00	313.990.759.000,00	0,00	0,00%
a DAK Regular	257.261.881.000,00	257.261.881.000,00	0,00	0,00%
b DAK Fisik Penugasan	56.728.878.000,00	56.728.878.000,00	0,00	0,00%
2 DAK Non Fisik	283.408.204.000,00	282.799.080.285,00	(609.123.715,00)	-0,21%
a Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	188.461.670.000,00	188.461.670.000,00	0,00	0,00%
b Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	82.991.441.000,00	82.939.073.106,00	(52.367.894,00)	-0,06%
c Dana Tambahan Penghasilan Guru	2.316.000.000,00	2.270.250.000,00	(45.750.000,00)	-1,98%



JENIS PENERIMAAN	TAHUN ANGGARAN 2023	R-APBD PERUBAHAN 2023		
	APBD MURNI	R-APBD PERUBAHAN	KENAIKAN	%
1	2	5	6=5-2	7=6/2
d Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	2.253.003.000,00	2.074.759.645,00	(178.243.355,00)	-7,91%
e Dana Bantuan Operasional Kesehatan & Bantuan Oprasional KB	5.709.890.000,00	5.478.032.331,00	(231.857.669,00)	-4,06%
f Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	547.525.111,00	(50.474.889,00)	-8,44%
g Dana Fasilitas Penanaman Modal	1.078.200.000,00	1.027.770.092,00	(50.429.908,00)	-4,68%
D DANA INSENTIF DAERAH	-	-	-	0,00%
3 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.324.102.500,00	1.278.720.000,00	(45.382.500,00)	-3,43%
A. HIBAH PT. JASA RAHARJA (OPERASIONAL SAMSAT)	1.324.102.500,00	1.278.720.000,00	(45.382.500,00)	-3,43%
a Hibah PT. Jasa Raharja (Operasional SAMSAT)	1.324.102.500,00	1.278.720.000,00	(45.382.500,00)	-3,43%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri, 2023



BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap diarahkan pada pelaksanaan Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023 yaitu: **"Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintah yang Baik dengan menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional"**. Tema ini mengalami perubahan untuk mengakomodir isu pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 sesuai dengan RKP Tahun 2023. Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 yaitu:

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah;
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah;
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.

Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional tercantum pada tabel 3.1 berikut ini :



Tabel 3.1

Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM	Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Ketahanan Pangan,	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	(PPH) Konsumsi	Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PINJAM	Pinjam		
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Persentase Koperasi yang mendapat dukungan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Wirausaha Baru	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Wirausaha Baru	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PROMOSI	Persentase kenaikan Minat	Dinas Penanaman Modal	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal	dan PTSP	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Pelabuhan perikanan yang terkelola dan beroperasi	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENUNJANG	Persentase tingkat kelancaran	Dinas Ketahanan Pangan,	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	pelayanan administrasi kantor	Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Temak	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Temak	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM	Persentase Peningkatan	Dinas Ketahanan Pangan,	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan	Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM	Nilai Tukar Petani (NTP)	Dinas Ketahanan Pangan,	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PENYULUHAN PERTANIAN		Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (NTP)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Terealisasiya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENUNJANG	Persentase Tingkat	Dinas Pendidikan	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Dinas Pendidikan	
			Angka partisipasi kasar (APK) SLB	Dinas Pendidikan	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	Dinas Pendidikan	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	Dinas Pendidikan	
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Dinas Pendidikan	
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Pendidikan	
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Dinas Pendidikan	
			Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah SMK yang Terevitalisasi	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah SMK yang Terevitalisasi	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi	Dinas Pendidikan	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		KURIKULUM	Minimum		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Dinas Kesehatan	
			Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	
			Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Kesehatan	
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Kesehatan	
			Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi	Dinas Kesehatan	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Kinerja RS		
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Sosial	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	Dinas Sosial	
			Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	Dinas Sosial	
			Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai	Dinas Kebudayaan	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		KESENIAN TRADISIONAL	pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Sekretariat Daerah	
			Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan	Inspektorat	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Inspektorat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	Dinas Sosial	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		MAKAM PAHLAWAN			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total	Dinas Kebudayaan	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			registrasi		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	Badan Kepegawaian dan Korpri	
			Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
		PROGRAM	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum,	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Penataan Ruang dan Pertanahan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Dinas Perhubungan	
			Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Dinas Perhubungan	
			Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	
			Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Dinas Perhubungan	
			Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran	Dinas Perhubungan	
			Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan	Dinas Perhubungan	
			Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	Dinas Perhubungan	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik	Dinas Perhubungan	
			Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	Dinas Perhubungan	
			Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	Dinas Perhubungan	
			Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencegahan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan	Dinas Sosial	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			kebutuhan dasar		
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi tercantum pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
69	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Pendidikan	250.232.000	304.149.500
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Dinas Pendidikan	13.440.108.000	14.485.644.849
			Angka partisipasi kasar (APK) SLB	Dinas Pendidikan	13.440.108.000	14.485.644.849
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan	13.440.108.000	14.485.644.849
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	Dinas Pendidikan	13.440.108.000	14.485.644.849
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	Dinas Pendidikan	13.440.108.000	14.485.644.849
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Dinas Pendidikan	13.440.108.000	14.485.644.849
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Dinas Pendidikan	13.440.108.000	14.485.644.849



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			pendidikan menengah			
			Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Dinas Pendidikan	13.440.108.000	14.485.644.849
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Sosial	12.671.049.240	12.262.695.581
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	Dinas Sosial	2.945.969.096	4.363.419.731
			Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	Dinas Sosial	2.945.969.096	4.363.419.731
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	969.815.400	969.815.400
			Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	51.796.000	51.796.000
			Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	178.622.000	220.213.950
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	272.658.600	584.467.079
			Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	Dinas Sosial	969.815.400	969.815.400
			Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang	Dinas Sosial	176.696.000	176.696.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti			
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	Dinas Sosial	5.454.154.740	5.292.186.847
			Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	Dinas Sosial	5.454.154.740	5.292.186.847
			Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	5.454.154.740	5.292.186.847
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial	559.025.200	609.025.200
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	Dinas Sosial	1.372.480.000	1.437.480.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	24.999.600	24.999.600
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	24.999.600	24.999.600
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	100.000.000	100.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Pemberdayaan	15.000.000	15.000.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		DAERAH PROVINSI		Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	765.318.672	732.081.624
			Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	765.318.672	732.081.624
			Cakupan Pembinaan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	765.318.672	732.081.624
			Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	765.318.672	732.081.624
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	73.027.500	56.712.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	50.000.000	50.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik antar Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	104.067.570	104.067.570
70	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	21.417.823.536	20.992.681.048
		PROGRAM PENINGKATAN	Persentase angka kecukupan	Dinas Ketahanan	898.350.456	1.086.844.769



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	energi tingkat ketersediaan	Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan		
			Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	898.350.456	1.086.844.769
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	898.350.456	1.086.844.769
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	32.178.738	32.178.738
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	59.347.441	59.347.441
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	576.800.392	586.800.392
			Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	576.800.392	586.800.392
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	413.471.000	513.471.000
		PROGRAM PELAYANAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas	651.975.050	931.975.050



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PENANAMAN MODAL	atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Penanaman Modal dan PTSP		
			Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	651.975.050	931.975.050
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	962.296.528	962.296.528
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	89.515.100	89.515.100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	5.863.899.123	760.478.673
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	6.816.498.641	6.799.317.474
			Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	6.816.498.641	6.799.317.474
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	4.025.167.517	8.785.850.072
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan,	4.025.167.517	8.785.850.072



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Pertanian dan Kesehatan Hewan		
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	4.025.167.517	8.785.850.072
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	759.463.103	700.876.173
			Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	759.463.103	700.876.173
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	18.586.700	18.586.700
			Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	18.586.700	18.586.700
			Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	18.586.700	18.586.700
		PROGRAM PENYULUHAN	Nilai Tukar Petani (NTP)	Dinas Ketahanan	1.218.217.121	1.284.312.921



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PERTANIAN		Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan		
			Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1.218.217.121	1.284.312.921
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.943.649.887	10.541.883.899
71	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.263.590.336	2.318.182.536
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	27.170.423.805	26.964.655.993
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Titik Rawan Banjir	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	19.438.575.918	24.353.782.565
			Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	19.438.575.918	24.353.782.565
			Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	19.438.575.918	24.353.782.565
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan	16.150.000.000	16.163.621.430



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	(%)	Ruang dan Pertanahan		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.200.000.000	1.153.024.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	95.624.894.370	110.385.384.306
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	5.381.122.016	5.178.832.072
			Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	29.863.213.587	34.699.516.738
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.324.631.288	4.226.080.905
			Persentase jalan kondisi baik (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	158.069.433.831	159.758.169.785
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.005.244.323	1.005.244.323
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.269.017.059	1.269.017.059



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencegahan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.861.843.000	4.976.823.131
			Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.861.843.000	4.976.823.131
			Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.861.843.000	4.976.823.131
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3.593.237.049	3.593.237.049
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	713.939.300	794.409.000
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28.751.264.656	29.354.880.250
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	514.140.835	439.140.835
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	40.061.800	0
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	250.000.000	250.000.000
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	41.600.700	55.240.700



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	245.778.610	492.295.610
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	609.031.027	592.874.175
			Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.457.858.955	23.583.882.366
			---	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.857.053.146	10.846.934.237
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	---	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.451.333.150	2.492.083.150
				Dinas Kelautan dan Perikanan	86.634.548	136.410.054
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.944.493.549	13.278.737.515
			Jumlah Pelabuhan perikanan yang terkelola dan beroperasi	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.634.548	136.410.054
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.944.493.549	13.278.737.515
			---	Dinas Kelautan dan Perikanan	606.845.641	645.757.363
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/N	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.805.833.755	3.971.149.503
			Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.805.833.755	3.971.149.503
			---	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.592.657.334	1.647.657.334
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	---	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.803.035.271	3.917.312.872



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	—	Dinas Kelautan dan Perikanan	549.049.066	707.064.826
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	564.078.929	563.992.229
			Persentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.205.600	29.205.600
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	684.310.337	469.541.437
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35.906.000	35.906.000
72	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Dinas Kesehatan	20.074.578.901	562.014.743
			Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Kesehatan	184.873.443.471	191.483.146.032
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Kesehatan	20.074.578.901	562.014.743
			Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja RS	Dinas Kesehatan	10.000.000	10.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks	Dinas Kesehatan	56.918.210.927	78.000.389.508



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas $\geq 80\%$ Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat			
			imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	56.918.210.927	78.000.389.508
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada	Dinas Kesehatan	461.516.469	461.516.469



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			RSUD Raja Ahmad Tabib			
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	56.918.210.927	78.000.389.508
			Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabi	Dinas Kesehatan	461.516.469	461.516.469
			Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	56.918.210.927	78.000.389.508
			Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	461.516.469	461.516.469
			Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	56.918.210.927	78.000.389.508
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	Dinas Kesehatan	7.575.694.621	7.275.844.433
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	168.031.400	205.444.360
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.528.515.272	8.455.979.080
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan	501.372.000	501.372.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				dan Pencatatan Sipil		
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110.000.000	153.869.500
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.083.270.236	1.361.182.668
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kab/ Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.200.000	35.200.000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	537.699.986	537.699.986
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	159.397.800	0



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		MASYARAKAT HUKUM ADAT	peningkatan kapasitas	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.537.404.843	2.533.887.843
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.089.836.807	10.149.977.333
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai keterbukaan informasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.020.110.873	31.017.924.243
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.020.110.873	31.017.924.243
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.873.718.888	8.556.183.505
			Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.873.718.888	8.556.183.505
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14.636.670.411	14.400.022.959
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	118.954.678	120.929.678
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika	118.954.678	120.929.678



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			pembangunan daerah			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika	317.744.458	320.490.558
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	---	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	18.127.125.531	18.040.070.320
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	---	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	240.565.200	434.013.500
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	---	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	17.590.300	17.590.300
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.164.996.089	1.220.355.240
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	74.687.000	74.687.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Sekretariat Daerah	6.756.282.481	7.294.960.621
			---	Sekretariat Daerah	209.726.055.824	225.532.587.450
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	795.895.306	795.895.306
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	---	Sekretariat Daerah	1.641.848.067	1.990.961.507
		PROGRAM FASILITASI DAN	---	Sekretariat	158.885.930	228.800.610



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		KOORDINASI HUKUM		Daerah		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	---	Sekretariat Daerah	2.488.920.778	2.605.032.500
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Sekretariat Daerah	326.963.393	330.868.393
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	---	Sekretariat Daerah	1.311.069.942	1.311.069.942
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Sekretariat DPRD	75.467.401.158	72.785.405.018
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	76.317.881.702	78.101.406.242
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	76.317.881.702	78.101.406.242
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	---	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	168.994.500	310.621.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Badan Keuangan dan Aset Daerah	61.392.722.627	56.629.903.326
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.699.999.992	5.919.999.992
			Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	677.713.254.585	815.226.185.033
		PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase jumlah barang milik	Badan Keuangan	3.704.304.000	4.674.304.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		BARANG MILIK DAERAH	daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	dan Aset Daerah		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	Badan Kepegawaian dan Korpri	13.047.941.424	12.998.356.739
			Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Badan Kepegawaian dan Korpri	135.152.200	139.652.200
			---	Badan Kepegawaian dan Korpri	1.932.401.596	2.016.701.596
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	---	Badan Kepegawaian dan Korpri	1.796.214.314	2.442.414.314
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.988.473.601	15.663.616.874
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.185.706.638	1.186.090.129
			Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	670.000.000	670.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	9.113.733.493	7.782.377.533
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	843.548.657	1.129.519.289
		PROGRAM PENUNJANG	---	Badan	998.770.750	1.282.714.540



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Penghubung Daerah		
			0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan	Inspektorat	3.642.063.840	3.965.270.248
			Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	Inspektorat	7.409.085.975	7.374.696.553
			Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan	Inspektorat	25.994.692.839	25.635.699.059
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Inspektorat	29.636.756.679	29.600.969.307
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	Inspektorat	4.946.595.455	4.722.683.230
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	Inspektorat	4.946.595.455	4.722.683.230
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB Ke atas	Inspektorat	4.946.595.455	4.722.683.230
			Persentase Tindakanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	Inspektorat	4.946.595.455	4.722.683.230
			Rata-Rata Nilai Peer Review antar Irbn	Inspektorat	4.946.595.455	4.722.683.230
				Inspektorat	664.148.008	920.344.158
			Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau	Inspektorat	1.416.647.866	1.775.701.813
			Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	Inspektorat	1.416.647.866	1.775.701.813
			Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN %	Inspektorat	2.080.795.874	2.696.045.971
			Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN	Inspektorat	1.416.647.866	1.775.701.813



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			% 100%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.665.755.245	10.620.809.282
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.462.722.968	2.099.870.763
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.937.000	29.200.000
			Tersedianya barang milik daerah yang dapat mendukung kinerja OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	78.009.194	1.100.551.825
73	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	50.000.000	74.515.100
			Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Perhubungan	100.179.120	100.085.520
			---	Dinas Perhubungan	1.499.052.500	1.669.496.921
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	Dinas Perhubungan	612.550.373	612.547.843
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	610.292.930	760.292.930
			Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	610.292.930	760.292.930
			Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Dinas Pariwisata	610.292.930	760.292.930
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata	11.406.891.539	12.083.131.539
			Jumlah Perjalanan Wisatawan	Dinas Pariwisata	11.406.891.539	12.083.131.539



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Nusantara			
			Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Dinas Pariwisata	11.406.891.539	12.083.131.539
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Dinas Pariwisata	99.444.600	99.444.600
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Dinas Pariwisata	107.493.700	228.741.850
74	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Perhubungan	269.196.200	1.104.697.200
			Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Perhubungan	17.535.675.522	17.862.043.793
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Dinas Perhubungan	99.948.500	99.948.500
			Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Dinas Perhubungan	14.434.147.000	14.434.147.000
			Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	7.550.000.000	7.550.000.000
			Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan	565.904.500	565.904.500
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Dinas Perhubungan	52.529.615.661	54.078.468.787
			Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran	Dinas Perhubungan	52.529.615.661	54.078.468.787



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan	Dinas Perhubungan	52.529.615.661	54.078.468.787
			Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	Dinas Perhubungan	52.529.615.661	54.078.468.787
			Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik	Dinas Perhubungan	52.529.615.661	54.078.468.787
			Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	Dinas Perhubungan	52.529.615.661	54.078.468.787
			Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	Dinas Perhubungan	52.399.016.661	53.978.108.787
			Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	Dinas Perhubungan	52.529.615.661	54.078.468.787
			—	Dinas Perhubungan	614.388.900	744.627.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.218.263.500	1.341.521.340
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.202.182.500	1.586.176.300
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.073.683.751	5.749.845.892
			Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.073.683.751	5.749.845.892
75	Pembangunan Manusia yang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Pendidikan	555.994.377.946	537.468.064.517



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Berkualitas dan Berbudaya	DAERAH PROVINSI				
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Pendidikan	1.873.791.631	1.986.107.943
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Dinas Pendidikan	336.404.640.218	337.638.865.552
			Angka partisipasi kasar (APK) SLB	Dinas Pendidikan	336.404.640.218	337.638.865.552
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan	336.404.640.218	337.638.865.552
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	Dinas Pendidikan	336.404.640.218	337.638.865.552
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	Dinas Pendidikan	336.404.640.218	337.638.865.552
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Dinas Pendidikan	336.404.640.218	337.638.865.552
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Pendidikan	130.676.923.174	131.179.784.293
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Dinas Pendidikan	336.404.640.218	337.638.865.552
			Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Dinas Pendidikan	336.404.640.218	337.638.865.552
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah SMK yang Terevitalisasi	Dinas Pendidikan	372.946.383	372.946.383
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	Dinas Pendidikan	372.946.383	372.946.383
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Dinas Pendidikan	372.946.383	372.946.383
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan	398.050.000	398.050.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	Dinas Pendidikan	70.000.000	70.000.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	---	Dinas Kesehatan	53.922.855.188	58.292.040.463
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE	Dinas Kesehatan	46.386.291.440	24.332.946.373
			---	Dinas Kesehatan	60.271.062.434	61.796.292.667
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	---	Dinas Kesehatan	20.510.497.321	18.847.771.597
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	---	Dinas Kesehatan	221.849.496	261.248.096
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	---	Dinas Kesehatan	1.220.270.400	1.205.850.400
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	90.989.000	90.989.000
			Persentase lanjut usia terlanter yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	173.164.000	173.164.000
			Persentase penyandang disabilitas terlanter yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	485.079.048	585.079.048
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.884.891.569	1.903.526.953
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Dinas Tenaga Kerja Dan	3.780.000.000	4.192.235.946



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		TENAGA KERJA	berbasis kompetensi	Transmigrasi		
			Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.780.000.000	4.192.235.946
			Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.780.000.000	4.192.235.946
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	74.000.000	74.000.000
			Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	74.000.000	74.000.000
			Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	74.000.000	74.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.290.875.684	11.469.370.459
			Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	145.889.885	145.889.650
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Kabupaten yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	128.478.000	80.897.576



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	224.192.500	224.192.248
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	251.847.400	251.847.400
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.149.804.467	26.355.544.021
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Perhubungan	119.936.500	142.380.992
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.953.959.047	14.538.981.088
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.737.425.000	3.043.155.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.737.425.000	3.043.155.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	25.198.730.500	31.296.455.500
			Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	25.198.730.500	31.296.455.500
			Cakupan Pembinaan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	25.198.730.500	31.296.455.500
			Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	25.198.730.500	31.296.455.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000.000	1.339.550.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Kebudayaan	129.749.900	129.884.435
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	Dinas Kebudayaan	193.219.048	193.219.048
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	Dinas Kebudayaan	193.219.048	193.219.048
			Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	193.219.048	193.219.048
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan	Dinas Kebudayaan	170.584.976	170.584.976



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)			
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	370.849.928	370.849.928
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	Dinas Kebudayaan	435.777.400	435.777.400
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	—	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	697.969.064	782.208.304
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	—	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	36.700.620	186.700.620
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	—	Badan Penghubung Daerah	6.688.597.416	6.839.436.620
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	—	Badan Penghubung Daerah	9.432.705.729	10.376.678.918
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Konflik antar suku dan etnis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.240.092.209	1.267.071.442
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.415.625.500	83.458.583.900



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		SERTA BUDAYA POLITIK				
			Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.415.625.500	83.458.583.900
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.740.282.500	5.858.561.485
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik antar Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.749.033	51.749.033
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.824.414.348	19.729.156.465

Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.530.637.344	1.464.163.248	



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.530.637.344	1.464.163.248	
				Cakupan Pembinaan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.530.637.344	1.464.163.248	
				Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.530.637.344	1.464.163.248	
		Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Pendidikan	750.696.000	912.448.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Dinas Pendidikan	40.320.324.000	43.456.934.547	
				Angka partisipasi kasar (APK) SLB	Dinas Pendidikan	40.320.324.000	43.456.934.547	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan	40.320.324.000	43.456.934.547	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	Dinas Pendidikan	40.320.324.000	43.456.934.547	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	Dinas Pendidikan	40.320.324.000	43.456.934.547	
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Dinas Pendidikan	40.320.324.000	43.456.934.547	
				Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Dinas Pendidikan	40.320.324.000	43.456.934.547	
				Ruang kelas	Dinas Pendidikan	40.320.324.000	43.456.934.547	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik				
		Menurunnya angka kemiskinan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	49.999.200	49.999.200	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	49.999.200	49.999.200	
		Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	292.110.000	226.848.000	
		Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	300.000.000	300.000.000	
		—	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Sosial	12.671.049.240	12.262.695.581	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	Dinas Sosial	2.945.969.096	4.363.419.731	
				Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau	Dinas Sosial	2.945.969.096	4.363.419.731	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				fasilitasi				
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	969.815.400	969.815.400	
				Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	51.796.000	51.796.000	
				Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	178.622.000	220.213.950	
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	272.658.600	584.467.079	
				Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	Dinas Sosial	969.815.400	969.815.400	
				Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	176.696.000	176.696.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	Dinas Sosial	5.454.154.740	5.292.186.847	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	Dinas Sosial	5.454.154.740	5.292.186.847	
				Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	5.454.154.740	5.292.186.847	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial	559.025.200	609.025.200	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	Dinas Sosial	1.372.480.000	1.437.480.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	100.000.000	100.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan	15.000.000	15.000.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan Pencatatan Sipil			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik antar Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	104.067.570	104.067.570	
2	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	43.774.599.548	42.167.535.596	
		Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.191.203.528	5.281.203.528	
				Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.191.203.528	5.281.203.528	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.721.239.000	4.621.239.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.867.775.450	8.387.775.450	
				Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.867.775.450	8.387.775.450	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8.660.668.752	8.660.668.752	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	805.635.900	805.635.900	
		Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	42.835.647.072	41.985.362.096	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1.796.700.912	2.173.689.538	
				Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1.796.700.912	2.173.689.538	
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1.796.700.912	2.173.689.538	
			PROGRAM	Persentase Daerah	Dinas Ketahanan	64.357.476	64.357.476	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan			
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	118.694.882	118.694.882	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	11.727.798.246	1.520.957.346	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	13.632.997.282	13.598.634.948	
				Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	13.632.997.282	13.598.634.948	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	8.050.335.034	17.571.700.144	
				Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan	8.050.335.034	17.571.700.144	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Hewan			
				Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	8.050.335.034	17.571.700.144	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1.518.926.206	1.401.752.346	
				Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1.518.926.206	1.401.752.346	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	37.173.400	37.173.400	
				Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	37.173.400	37.173.400	
				Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	37.173.400	37.173.400	
			PROGRAM	Nilai Tukar Petani (NTP)	Dinas Ketahanan	2.436.434.242	2.568.625.842	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PENYULUHAN PERTANIAN		Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan			
				Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.436.434.242	2.568.625.842	
3	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	108.681.695.220	107.858.623.972	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.020.977.292	4.020.977.292	
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	14.372.948.196	14.372.948.196	
		Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencegahan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.355.000.000	1.088.084.644	
		Percepatan	PROGRAM	Jumlah Titik Rawan Banjir	Dinas Pekerjaan	116.631.455.508	146.122.695.390	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembangunan Infrastruktur Dasar	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
				Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	116.631.455.508	146.122.695.390	
				Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	116.631.455.508	146.122.695.390	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	96.900.000.000	96.981.728.580	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	7.200.000.000	6.918.144.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	573.749.366.220	662.312.305.836	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	179.179.281.522	208.197.100.428	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kondisi baik (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	948.416.602.986	958.549.018.710	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pertanahan			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	7.614.102.354	7.614.102.354	
		—	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.263.590.336	2.318.182.536	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	5.381.122.016	5.178.832.072	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.324.631.288	4.226.080.905	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencegahan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.506.843.000	3.888.738.487	
				Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.861.843.000	4.976.823.131	
				Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.861.843.000	4.976.823.131	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	713.939.300	794.409.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DAERAH PROVINSI					
				Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28.751.264.656	29.354.880.250	
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	514.140.835	439.140.835	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	40.061.800	0	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	250.000.000	250.000.000	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	41.600.700	55.240.700	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	245.778.610	492.295.610	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	609.031.027	592.874.175	
				Tingkat Kelancaran	Dinas Kelautan	25.457.858.955	23.583.882.366	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	dan Perikanan			
				—	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.857.053.146	10.846.934.237	
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	—	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.451.333.150	2.492.083.150	
					Dinas Kelautan dan Perikanan	86.634.548	136.410.054	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.944.493.549	13.278.737.515	
				Jumlah Pelabuhan perikanan yang dikelola dan beroperasi	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.634.548	136.410.054	
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.944.493.549	13.278.737.515	
				—	Dinas Kelautan dan Perikanan	606.845.841	645.757.363	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/N	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.805.833.755	3.971.149.503	
				Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.805.833.755	3.971.149.503	
				—	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.592.657.334	1.647.657.334	
			PROGRAM	—	Dinas Kelautan	3.803.035.271	3.917.312.872	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		dan Perikanan			
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	—	Dinas Kelautan dan Perikanan	549.049.066	707.064.826	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	564.078.929	563.992.229	
				Persentase beroperasinya pengelolaan hutan di provinsi kepulauan riau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.205.600	29.205.600	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase beroperasinya pengelolaan hutan di provinsi kepulauan riau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	684.310.337	469.541.437	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya Kesehatan Daerah Allran Sungai Kepulauan Riau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35.906.000	35.906.000	
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.659.984.356	4.881.420.960	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Sekretariat Daerah	8.927.583.267	8.915.868.267	



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemerintahan	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Sekretariat Daerah	980.890.179	992.605.179	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Sekretariat DPRD	226.402.203.474	218.356.215.054	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	228.953.645.106	234.304.218.726	
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	228.953.645.106	234.304.218.726	
		Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	131.730.033.699	129.600.206.631	
		Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.089.836.807	10.149.977.333	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tertuka dan Terintegrasi						
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai keterbukaan informasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.020.110.873	31.017.924.243	
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.020.110.873	31.017.924.243	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.873.718.888	8.556.183.505	
				Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.873.718.888	8.556.183.505	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	118.954.678	120.929.678	
				Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun	Dinas Komunikasi dan Informatika	118.954.678	120.929.678	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				perencanaan pembangunan daerah				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika	317.744.458	320.490.558	
		—	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Dinas Kesehatan	20.074.578.901	562.014.743	
				Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Kesehatan	184.873.443.471	191.483.146.032	
				Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Kesehatan	20.074.578.901	562.014.743	
				Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja RS	Dinas Kesehatan	10.000.000	10.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	56.918.210.927	78.000.389.508	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas $\geq 80\%$ Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat				
				imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang	Dinas Kesehatan	56.918.210.927	78.000.389.508	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib				
				Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	461.516.469	461.516.469	
				Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	56.918.210.927	78.000.389.508	
				Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabi	Dinas Kesehatan	461.516.469	461.516.469	
				Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	56.918.210.927	78.000.389.508	
				Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	461.516.469	461.516.469	
				Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	56.918.210.927	78.000.389.508	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	7.575.694.621	7.275.844.433	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	168.031.400	205.444.360	
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.528.515.272	8.455.979.080	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	501.372.000	501.372.000	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110.000.000	153.869.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	1.083.270.236	1.361.182.668	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			KEPENDUDUKAN	berdasarkan database konsolidasi kemendagri	Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kab/ Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.200.000	35.200.000	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparat/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	537.699.986	537.699.986	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	159.397.800	0	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.537.404.843	2.533.887.843	
				---	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	18.127.125.531	18.040.070.320	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	---	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	240.565.200	434.013.500	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	---	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	17.590.300	17.590.300	
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	74.687.000	74.687.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Sekretariat Daerah	3.780.421.392	4.323.004.532	
				---	Sekretariat Daerah	209.726.055.824	225.532.587.450	
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	795.895.306	795.895.306	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	---	Sekretariat Daerah	1.641.848.067	1.990.961.507	
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	---	Sekretariat Daerah	158.885.930	228.800.610	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	---	Sekretariat Daerah	2.488.920.778	2.605.032.500	
			PROGRAM KEBIJAKAN	---	Sekretariat Daerah	1.311.069.942	1.311.069.942	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	---	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	168.994.500	310.621.700	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Badan Keuangan dan Aset Daerah	61.392.722.627	56.629.903.326	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.699.999.992	5.919.999.992	
				Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	677.713.254.585	815.226.185.033	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.704.304.000	4.674.304.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	Badan Kepegawaian dan Korpri	13.047.941.424	12.998.356.739	
				Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Badan Kepegawaian dan Korpri	135.152.200	139.652.200	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				---	Badan Kepegawaian dan Korpri	1.932.401.596	2.016.701.596	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	---	Badan Kepegawaian dan Korpri	1.796.214.314	2.442.414.314	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.988.473.601	15.663.616.874	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.185.706.638	1.186.090.129	
				Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	670.000.000	670.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	9.113.733.493	7.782.377.533	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	843.548.657	1.129.519.289	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	---	Badan Penghubung Daerah	998.770.750	1.282.714.540	
				0Persentase Dukungan	Inspektorat	3.642.063.840	3.965.270.248	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penunjang Urusan Pengawasan				
				Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	Inspektorat	7.409.085.975	7.374.696.553	
				Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan	Inspektorat	25.994.692.839	25.635.699.059	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Inspektorat	29.636.756.679	29.600.969.307	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	Inspektorat	4.946.595.455	4.722.683.230	
				Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	Inspektorat	4.946.595.455	4.722.683.230	
				Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB Ke atas	Inspektorat	4.946.595.455	4.722.683.230	
				Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	Inspektorat	4.946.595.455	4.722.683.230	
				Rata-Rata Nilai Peer Review antar Irbn	Inspektorat	4.946.595.455	4.722.683.230	
					Inspektorat	664.148.008	920.344.158	
				Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau	Inspektorat	1.416.647.866	1.775.701.813	
				Persentase Perangkat	Inspektorat	1.416.647.866	1.775.701.813	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas				
				Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN %	Inspektorat	2.080.795.874	2.696.045.971	
				Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	Inspektorat	1.416.647.866	1.775.701.813	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.685.755.245	10.620.809.282	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.462.722.968	2.099.870.763	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.937.000	29.200.000	
				Tersedianya barang milik daerah yang dapat mendukung kinerja OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	78.009.194	1.100.551.825	
5	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Peningkatan Sektor Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	610.292.930	760.292.930	
				Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	610.292.930	760.292.930	
				Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Dinas Pariwisata	610.292.930	760.292.930	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata	11.406.891.539	12.083.131.539	
				Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Dinas Pariwisata	11.406.891.539	12.083.131.539	
				Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Dinas Pariwisata	11.406.891.539	12.083.131.539	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Dinas Pariwisata	99.444.600	99.444.600	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Dinas Pariwisata	107.493.700	228.741.850	
		---	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	50.000.000	74.515.100	
				Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Perhubungan	100.179.120	100.085.520	
				---	Dinas Perhubungan	1.499.052.500	1.669.496.921	
			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi	Dinas Perhubungan	612.550.373	612.547.843	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PELAYARAN	dengan baik				
6	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.873.054.000	5.366.085.360	
		Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.213.095.000	9.517.057.800	
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.442.102.506	34.499.075.352	
				Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.442.102.506	34.499.075.352	
		—	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Perhubungan	269.196.200	1.104.697.200	
				Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Perhubungan	17.535.675.522	17.862.043.793	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	enyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Dinas Perhubungan	99.948.500	99.948.500	
				Penyediaan Jaringan	Dinas	14.434.147.000	14.434.147.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Perhubungan			
				Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	7.550.000.000	7.550.000.000	
				Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan	565.904.500	565.904.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Dinas Perhubungan	52.529.615.661	54.078.468.787	
				Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran	Dinas Perhubungan	52.529.615.661	54.078.468.787	
				Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan	Dinas Perhubungan	52.529.615.661	54.078.468.787	
				Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	Dinas Perhubungan	52.529.615.661	54.078.468.787	
				Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik	Dinas Perhubungan	52.529.615.661	54.078.468.787	
				Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	Dinas Perhubungan	52.529.615.661	54.078.468.787	
				Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	Dinas Perhubungan	52.399.016.661	53.978.108.787	
				Realisasi Pendapatan	Dinas	52.529.615.661	54.078.468.787	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	Perhubungan			
				---	Dinas Perhubungan	614.388.900	744.627.900	
7	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	29.907.918.094	29.077.962.176	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.474.850.000	6.086.310.000	
				Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.474.850.000	6.086.310.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	50.397.461.000	62.592.911.000	
				Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	50.397.461.000	62.592.911.000	
				Cakupan Pembinaan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	50.397.461.000	62.592.911.000	
				Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	50.397.461.000	62.592.911.000	
			PROGRAM	Persentase Kwartir yang	Dinas	2.400.000.000	2.679.100.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	Kepemudaan dan Olahraga			
		Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Pendidikan	1.667.983.133.838	1.612.404.193.551	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Dinas Pendidikan	1.009.213.920.654	1.012.916.596.656	
				Angka partisipasi kasar (APK) SLB	Dinas Pendidikan	1.009.213.920.654	1.012.916.596.656	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan	1.009.213.920.654	1.012.916.596.656	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	Dinas Pendidikan	1.009.213.920.654	1.012.916.596.656	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	Dinas Pendidikan	1.009.213.920.654	1.012.916.596.656	
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Dinas Pendidikan	1.009.213.920.654	1.012.916.596.656	
				Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Pendidikan	392.030.769.522	393.539.352.879	
				Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Dinas Pendidikan	1.009.213.920.654	1.012.916.596.656	
				Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Dinas Pendidikan	1.009.213.920.654	1.012.916.596.656	
			PROGRAM	Jumlah SMK yang	Dinas Pendidikan	1.118.839.149	1.118.839.149	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PENGEMBANGAN KURIKULUM	Terevitalisasi				
				Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	Dinas Pendidikan	1.118.839.149	1.118.839.149	
				Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Dinas Pendidikan	1.118.839.149	1.118.839.149	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan	1.194.150.000	1.194.150.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	Dinas Pendidikan	210.000.000	210.000.000	
		Menurunnya angka kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.769.783.138	3.807.053.906	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.560.000.000	8.384.471.892	
				Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.560.000.000	8.384.471.892	
				Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.560.000.000	8.384.471.892	
			PROGRAM PENGAWASAN	Persentase kasus ketenagakerjaan yang	Dinas Tenaga Kerja Dan	148.000.000	148.000.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			KETENAGAKERJAAN	tertangani	Transmigrasi			
				Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	148.000.000	148.000.000	
				Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	148.000.000	148.000.000	
		Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Kebudayaan	518.999.600	519.537.740	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	Dinas Kebudayaan	772.876.192	772.876.192	
				Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	Dinas Kebudayaan	772.876.192	772.876.192	
				Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	772.876.192	772.876.192	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap	Dinas Kebudayaan	682.339.904	682.339.904	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				masyarakat 15 tahun ke atas)				
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	1.483.399.712	1.483.399.712	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	Dinas Kebudayaan	1.743.109.600	1.743.109.600	
		---	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Pendidikan	1.873.791.631	1.986.107.943	
				---	Dinas Kesehatan	53.922.855.188	58.292.040.463	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE	Dinas Kesehatan	46.386.291.440	24.332.946.373	
				---	Dinas Kesehatan	60.271.062.434	61.796.292.667	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	---	Dinas Kesehatan	20.510.497.321	18.847.771.597	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT	---	Dinas Kesehatan	221.849.496	261.248.096	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	---	Dinas Kesehatan	1.220.270.400	1.205.850.400	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	90.989.000	90.989.000	
				Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	173.164.000	173.164.000	
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	485.079.048	585.079.048	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.290.875.684	11.469.370.459	
				Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan	145.889.885	145.889.850	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan Pencatatan Sipil			
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Kabupaten yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	128.478.000	80.897.576	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	224.192.500	224.192.248	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	251.847.400	251.847.400	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.149.804.467	26.355.544.021	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Perhubungan	119.936.500	142.380.992	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	---	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	697.969.064	782.208.304	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	---	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	36.700.620	186.700.620	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	---	Badan Penghubung Daerah	6.688.597.416	6.839.436.620	
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	---	Badan Penghubung Daerah	9.432.705.729	10.376.678.918	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Konflik antar suku dan etnis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.240.092.209	1.267.071.442	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.415.625.500	83.458.583.900	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.415.625.500	83.458.583.900	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.740.282.500	5.858.581.485	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik antar Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.749.033	51.749.033	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.824.414.348	19.729.156.465	

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, secara umum difokuskan untuk keperluan:

1. Penyesuaian terhadap penganggaran SiLPA berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.
2. Penyesuaian terhadap pergeseran anggaran untuk belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Wajib yang mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sehingga telah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD Tahun 2023;
3. Pemenuhan Kebutuhan Mendesak dan Bersifat Wajib/Mengikat Tahun 2023.
4. Penyiapan Rencana Kegiatan Pembangunan fisik Tahun 2022 yang harus dibiayai pada tahun 2023.

BAB IV

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Perubahan Prioritas dan plafon anggaran sementara menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan pada Tahun Anggaran 2023 tercantum pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	908.963.180.178	892.936.658.744	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	908.953.180.178	892.936.658.744	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	908.902.046.178	891.096.708.744	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	856.067.266.677	537.918.171.980	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.873.791.631	1.986.107.943	
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	546.558.548	914.579.340	
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	860.034.763	680.776.363	
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000	50.000.000	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	417.198.320	340.752.240	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	461.905.592.862	439.272.984.362	
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	460.244.270.862	437.439.738.362	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.340.304.000	1.350.482.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	311.018.000	472.784.000	
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	120.000.000	120.000.000	
1.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	120.000.000	120.000.000	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	1.447.164.000	1.480.182.500	
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	250.232.000	304.149.500	
1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	671.932.000	683.447.000	
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	44.636.000	
1.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000	447.950.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.097.179.800	1.857.182.301	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.172.000	432.386.500	
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.169.000	40.169.000	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.000.000	125.000.000	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	345.488.000	345.488.000	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	35.000.000	
1.01.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	95.000.000	95.000.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.350.800	724.138.801	
1.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	50.000.000	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.863.500	1.203.847.850	
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	349.563.500	877.132.500	
1.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	401.100.000	526.715.160	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.153.814.784	90.026.120.794	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	784.301.645	814.301.645	
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.670.000	178.900.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.216.843.139	88.831.919.149	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.719.280.000	1.972.746.400	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	204.300.000	348.897.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.399.960.000	1.558.849.000	
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.000.000	85.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	349.993.782.218	362.337.540.401	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	193.071.643.561	195.142.267.184	
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	4.500.000.000	4.500.000.000	
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	16.130.087.000	16.205.522.445	
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4.391.919.000	4.332.372.800	
1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	2.495.644.000	2.329.998.800	
1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	3.119.555.000	3.104.813.600	
1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	2.071.733.000	1.434.803.800	
1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	1.181.441.000	1.187.926.600	
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3.247.560.000	4.499.875.800	
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.011.058.000	1.023.821.800	
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.940.108.000	9.985.844.849	
1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1.498.086.000	2.342.692.600	
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.424.216.000	4.411.249.204	
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.533.250.000	1.203.443.600	
1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	648.868.000	614.584.000	
1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	648.868.000	593.890.000	
1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	648.868.000	326.417.800	
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	402.632.000	401.972.600	
1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	201.316.000	183.819.000	
1.01.02.1.01.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	525.750.000	454.252.600	
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	848.593.000	728.189.000	
1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1.556.014.000	787.839.600	
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	5.483.904.000	8.415.004.396	
1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	275.000.000	75.917.200	
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.175.000.000	3.207.231.600	
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	15.456.730.000	15.456.730.000	
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	150.000.000	150.000.000	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	264.324.000	419.377.206	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah	149.034.000	219.030.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Seandainya	
1	2	3	4	5
	Menengah Atas			
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.742.000.000	912.000.000	
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	105.368.085.561	107.660.477.484	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	130.676.923.174	131.179.784.293	
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	2.959.915.000	2.959.915.000	
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4.520.890.000	4.165.670.000	
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	9.873.965.445	9.475.087.770	
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	9.021.876.000	9.431.063.000	
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.240.508.000	1.137.370.000	
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	547.986.000	527.262.000	
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.138.908.420	4.477.325.530	
1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	3.875.801.767	3.447.808.000	
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	356.599.000	387.255.000	
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	-	2.540.000.000	
1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	74.899.816	367.658.811	
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	10.625.000.000	9.312.915.892	
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	6.300.000.000	5.800.000.000	
1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	150.000.000	150.000.000	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000	310.000.000	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	150.000.000	349.999.834	
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.894.000.000	1.304.000.000	
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	74.646.675.726	75.037.263.456	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	26.245.215.483	26.015.488.824	
1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.971.180.000	1.971.180.000	
1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.354.880.000	1.947.520.000	
1.01.02.1.03.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	548.800.000	509.180.000	
1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	225.810.000	258.184.306	
1.01.02.1.03.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	529.200.000	520.700.000	
1.01.02.1.03.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	960.377.270	1.145.675.540	
1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	1.117.700.000	1.804.550.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	3.799.920.000	2.948.811.000	
1.01.02.1.03.19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	135.900.000	274.030.000	
1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	316.660.000	179.930.000	
1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.271.259.000	2.004.474.733	
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah		818.580.000	
1.01.02.1.03.37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	87.600.000	121.818.961	
1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.784.448.000	1.299.992.000	
1.01.02.1.03.39	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	80.000.000	80.000.000	
1.01.02.1.03.48	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	90.000.000	90.000.000	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minal, Bakat dan Kreativitas Siswa	959.758.500	933.193.500	
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	149.034.000	149.034.000	
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	416.000.000	416.000.000	
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.446.908.713	8.542.754.884	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	372.946.383	372.946.383	
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	297.946.383	297.946.383	
1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	297.946.383	297.946.383	
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	75.000.000	75.000.000	
1.01.03.1.02.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	75.000.000	75.000.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	398.050.000	398.050.000	
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	398.050.000	398.050.000	
1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	200.000.000	200.000.000	
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	198.050.000	198.050.000	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	70.000.000	70.000.000	
1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000	50.000.000	
1.01.05.1.01.01	Pemilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh	50.000.000	50.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Masyarakat			
1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20.000.000	20.000.000	
1.01.05.1.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20.000.000	20.000.000	
1.01.0.00.0.00.01.0001	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	2.051.135.000	1.840.150.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.051.135.000	1.840.150.000	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	
1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000	100.000.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.750.000	84.750.000	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000	7.000.000	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.750.000	67.750.000	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.856.385.000	1.655.400.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.400.000	152.400.000	
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.000.000	105.000.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.608.985.000	1.398.000.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	499.349.970.890	514.252.726.489	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	499.349.970.890	514.252.726.489	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	97.174.388.220	98.978.134.484	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.531.947.056	24.458.052.351	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	242.739.100	269.938.100	
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.068.000	9.068.000	
1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	169.000.000	169.000.000	
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.671.100	91.871.100	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.041.087.314	18.748.469.969	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.214.357.718	17.871.180.373	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	795.936.000	795.936.000	
1.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	19.869.591	46.669.591	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	11.134.005	34.674.005	
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	242.153.648	268.888.648	
1.02.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	110.647.948	125.647.948	
1.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	131.505.700	143.340.700	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.443.605	636.222.805	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.914.716	6.914.716	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.965.688	98.248.888	
1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.949.165	4.949.165	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.796.160	86.524.160	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.493.946	27.710.000	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.898.580	17.898.580	
1.02.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	27.055.350	31.839.296	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.370.000	382.338.000	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	421.768.690	586.992.790	
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	117.217.711	168.253.841	
1.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.562.400	187.528.500	
1.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000	85.000.000	
1.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.988.479	148.210.449	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.292.513.800	3.257.513.800	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000	155.000.000	
1.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.863.800	44.863.800	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.057.650.000	3.057.650.000	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	678.230.989	638.925.439	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	333.646.800	348.646.800	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	54.822.120	5.799.120	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.465.940	29.485.940	
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.438.279	256.013.579	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	59.127.510.691	60.473.077.339	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	20.328.880.852	20.794.345.052	
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.991.156.000	10.360.542.000	
1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di ODPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	750.000.000	750.000.000	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	8.450.000.000	8.450.000.000	
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	202.023.120	369.367.080	
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.935.701.732	2.854.435.972	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	37.444.113.339	38.181.627.687	
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	16.500.000	16.500.000	
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	444.576.018	220.242.018	
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.330.569.900	1.341.789.900	
1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	31.694.000	31.694.000	
1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	100.000.000	100.000.000	
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.075.584.000	1.087.824.000	
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	238.012.302	238.012.302	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	335.000.000	335.000.000	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.405.000.000	1.883.048.539	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	177.170.400	187.170.400	
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	564.735.610	578.480.544	
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	19.000.000	29.000.000	
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	200.440.000	200.440.000	
1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	962.770.940	1.562.770.940	
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.329.254.372	30.375.851.247	
1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.214.840	19.214.840	
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	42.164.189	42.164.189	
1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	22.128.768	22.128.768	
1.02.02.1.02.27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	130.298.000	130.298.000	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.317.351.500	1.468.869.600	
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	117.381.500	240.043.500	
1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	451.000.000	520.100.000	
1.02.02.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	749.000.000	709.726.100	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	37.235.000	37.235.000	
1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17.985.000	17.985.000	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	19.250.000	19.250.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	13.072.710.577	12.577.905.298	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	12.908.010.126	12.382.694.947	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.691.216.940	12.165.801.761	
1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	216.793.186	216.793.186	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	164.700.451	155.311.351	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	51.002.572	81.613.472	
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	113.697.879	113.697.879	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	221.849.496	261.248.096	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	60.938.576	87.172.176	
1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	60.938.576	87.172.176	
1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	160.910.920	174.075.920	
1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	160.910.920	174.075.920	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.220.270.400	1.205.850.400	
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.220.270.400	1.205.850.400	
1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.220.270.400	1.205.850.400	
1.02.0.00.0.00.02.0002	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	276.748.916.792	264.815.347.891	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	211.763.494.776	199.077.697.581	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.088.092.318	88.302.294.920	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67.322.332.318	87.427.868.050	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	740.760.000	849.426.870	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	
1.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	15.000.000	15.000.000	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	
1.02.01.1.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	150.000.000	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	962.728.438	1.822.336.158	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	75.000.000	
1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000	659.608.720	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	376.215.336	376.215.336	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.088.562	71.088.562	
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	35.000.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.422.540	405.422.540	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.074.578.901	582.014.743	
1.02.01.1.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.933.200	582.014.743	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.526.111.153	17.511.581.866	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	50.000.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.289.822.453	7.049.417.790	
1.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.020.000	281.973.330	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.936.268.700	10.120.200.846	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.981.885.865	4.400.674.778	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	62.804.641	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	383.190.999	494.782.874	
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.528.794.866	3.843.287.463	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	100.000.000.000	106.518.686.016	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100.000.000.000	106.518.686.016	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.379.727.385	78.461.805.977	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	56.918.210.927	78.000.369.508	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	-	20.005.645.701	
1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	739.724.620	641.364.745	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	53.402.871.056	54.292.888.811	
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	200.000.000	500.000.000	
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	701.314.490	701.314.490	
1.02.02.1.01.20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.000.000	9.875.000	
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.849.300.761	1.849.300.761	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	461.516.469	461.516.469	
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	25.000.000	25.000.000	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	286.516.469	286.516.469	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	150.000.000	150.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.575.894.621	7.275.844.433	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	7.328.618.000	6.962.517.812	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.328.618.000	6.962.517.812	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	247.076.621	313.326.621	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	247.076.621	313.326.621	
1.02.0.00.0.00.02.0004	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	125.426.665.876	130.461.244.014	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	70.459.136.951	75.540.719.070	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	252.957.320	252.957.635	
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	202.957.320	202.957.635	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	50.000.000	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.647.453.319	42.500.456.439	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.088.227.819	41.706.730.958	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	529.418.000	743.917.980	
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.807.500	49.807.500	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	443.362.200	443.362.200	
1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	393.021.300	393.021.300	
1.02.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	50.330.900	50.330.900	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.059.223.300	1.122.080.342	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	94.910.000	94.910.000	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.997.700	99.997.700	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	398.543.400	365.193.400	
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	149.917.400	149.917.400	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315.854.800	412.061.842	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	559.147.700	601.753.700	
1.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	559.147.700	601.753.700	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.534.972.745	1.534.972.745	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.534.972.745	1.534.972.745	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.992.029.367	5.994.327.467	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.056.048	55.056.048	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	559.228.600	591.526.700	
1.02.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.324.112.340	1.324.112.340	
1.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	49.300.000	49.300.000	
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.723.500	730.723.500	
1.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	998.600.879	998.600.879	
1.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	99.600.000	99.600.000	
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.799.820.000	1.799.820.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	345.388.000	345.388.000	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	20.000.000.000	23.090.818.543	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	20.000.000.000	23.090.818.543	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	47.528.743.183	48.650.658.846	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	48.388.291.440	47.327.444.317	
1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit		22.994.497.944	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	41.771.641.740	19.397.375.875	
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	1.559.440.000	1.779.440.000	
1.02.02.1.01.12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	1.025.800.000	1.028.777.500	
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	1.340.885.500	1.440.828.798	
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	688.524.200	688.524.200	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	633.472.443	833.472.128	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	633.472.443	833.472.128	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	199.988.700	179.752.600	
1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	199.988.700	179.752.600	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	309.990.600	308.890.600	
1.02.02.1.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	309.990.600	308.890.600	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.437.786.744	6.289.865.299	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	6.708.647.244	5.599.403.699	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.708.647.244	5.599.403.699	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	729.139.500	679.461.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
	Sumber Daya Manusia			
	Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	729.139.500	670.461.600	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	361.810.146.533	387.550.026.812	
1.03.2.10.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	361.810.146.533	387.550.026.812	
1.03.2.10.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	349.790.802.893	375.792.416.189	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.170.423.806	26.964.666.993	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	557.544.824	652.602.824	
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	154.544.824	75.277.700	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	338.000.000	510.876.284	
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.000.000	66.446.840	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.640.769.780	17.807.854.561	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.760.193.780	15.995.934.661	
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.680.576.000	1.542.408.000	
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000	69.511.900	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	51.084.970	51.084.970	
1.03.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	51.084.970	51.084.970	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.277.000	51.650.000	
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.277.000	51.650.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.893.526.516	2.289.321.310	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.608.704	20.608.704	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	853.056.686	1.005.423.248	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.677.831	94.580.381	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.307.884	141.307.884	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	115.805.011	100.724.508	
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	76.576.900	47.047.350	
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.892.500	51.892.500	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	585.801.000	637.736.735	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	892.860.136	1.297.762.640	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
	Daerah			
1.03.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	537.751.155	642.643.660	
1.03.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.185.980	56.185.980	
1.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	298.923.000	398.923.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.808.696.630	4.861.624.638	
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.897.000	15.897.000	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.170.005.950	1.148.805.950	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.620.692.680	3.498.821.688	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.764.950	342.764.950	
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	193.689.750	193.689.750	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.900.500	43.900.500	
1.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.194.700	105.194.700	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19.438.575.918	24.353.782.565	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	19.438.576.918	24.353.782.565	
1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	0	114.804.736	
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	2.130.000.000	2.143.612.711	
1.03.02.1.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	11.390.000.000	16.516.746.728	
1.03.02.1.01.16	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	4.690.000.000	4.506.000.000	
1.03.02.1.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.028.575.918	866.230.890	
1.03.02.1.01.83	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	200.000.000	207.387.500	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.150.000.000	16.163.621.430	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas	16.150.000.000	16.163.621.430	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sabelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Kabupaten/Kota			
1.03.03.1.01.04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	16.150.000.000	16.163.621.430	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.200.000.000	1.153.024.000	
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.200.000.000	1.153.024.000	
1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1.014.677.460	954.677.460	
1.03.05.1.01.06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	185.322.540	198.346.540	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	95.624.894.370	110.385.384.308	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	95.624.894.370	110.385.384.308	
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	8.038.797.508	9.528.049.571	
1.03.08.1.01.02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsual Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7.817.360.596	8.774.779.747	
1.03.08.1.01.10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	79.868.736.266	92.082.554.988	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	29.863.213.587	34.699.516.738	
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	29.863.213.587	34.699.516.738	
1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.957.344.384	2.884.214.340	
1.03.09.1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	26.905.869.203	31.815.302.398	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	158.069.433.831	159.758.169.785	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	158.069.433.831	159.758.169.785	
1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	6.500.000.000	6.645.584.000	
1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	2.100.000.000	4.452.206.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sabelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	3.000.000.000	2.978.605.000	
1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	34.200.000.000	33.345.158.900	
1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	88.458.000.000	88.166.638.052	
1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	3.055.800.000	3.055.800.000	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.598.440.278	1.558.050.040	
1.03.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan	8.887.747.029	9.198.686.239	
1.03.10.1.01.13	Pembangunan Flyover	4.098.475.380	4.098.475.380	
1.03.10.1.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	6.172.971.144	6.258.955.774	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.005.244.323	1.005.244.323	
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	627.447.315	627.447.315	
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	427.447.315	427.447.315	
1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	100.000.000	100.000.000	
1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	100.000.000	100.000.000	
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	227.797.008	227.797.008	
1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	227.797.008	227.797.008	
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	150.000.000	150.000.000	
1.03.11.1.03.01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000	
1.03.11.1.03.02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	100.000.000	100.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.269.017.059	1.269.017.059	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	300.000.000	300.000.000	
1.03.12.1.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	300.000.000	300.000.000	
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	133.237.048	133.237.048	
1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	133.237.048	133.237.048	
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	485.780.011	485.780.011	
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	250.000.000	250.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	3
1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	235.780.011	235.780.011	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	350.000.000	350.000.000	
1.03.12.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	130.000.000	130.000.000	
1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	220.000.000	220.000.000	
1.03.2.10.2.10.01.0001	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	10.937.614.536	10.110.681.509	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	691.881.232	705.768.532	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	308.627.800	382.535.100	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	73.222.800	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72.468.800	74.939.800	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	74.515.100	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.159.000	159.857.800	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.433.432	289.433.432	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.433.432	289.433.432	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.800.000	23.800.000	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.800.000	23.800.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	6.381.122.016	5.178.832.072	
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.381.122.016	5.178.832.072	
1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.250.000.000	5.047.710.056	
1.03.09.1.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	131.122.016	131.122.016	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.324.631.288	4.228.080.905	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	4.324.631.288	4.228.080.905	
1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	2.093.000.000	1.997.442.385	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.231.631.288	2.228.638.520	
1.03.2.10.2.10.01.0002	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN	1.681.729.104	1.686.929.104	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.681.729.104	1.886.929.104	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	3
	PROVINSI			
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.203.050	367.292.700	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.159.750	27.718.000	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.783.400	41.366.800	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.080.400	1.984.400	
1.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	104.048.500	104.048.500	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.151.000	212.176.000	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.721.154	528.329.654	
1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	416.213.154	397.673.154	
1.03.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	15.488.000	50.866.500	
1.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.020.000	79.788.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	816.166.400	679.652.260	
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.680.000	48.702.650	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	619.486.400	631.149.600	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.636.500	91.454.500	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.961.500	67.104.500	
1.03.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.675.000	24.350.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	193.123.089.841	205.568.255.519	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	193.123.089.841	205.568.255.519	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	193.123.089.841	205.568.255.519	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.963.002.326	15.340.071.951	
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.111.784.580	1.044.765.603	
1.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.045.242.760	1.038.465.803	
1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.541.800	6.299.800	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.893.856.521	8.150.854.305	
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.070.456.521	7.341.054.305	
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	823.200.000	809.840.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	412.879.336	346.228.362	
1.04.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	133.257.192	133.080.314	
1.04.01.1.03.08	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	279.622.144	213.148.048	
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	731.812.912	565.627.672	
1.04.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	631.812.912	465.627.672	
1.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	100.000.000	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.128.912.757	2.123.252.391	
1.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.170.000	4.170.000	
1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.000.000	96.000.000	
1.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.913.000	40.913.000	
1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	337.404.500	331.591.700	
1.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	121.496.585	121.649.019	
1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraluran Perundang-Undangan	77.376.000	77.376.000	
1.04.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000	25.000.000	
1.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	99.948.144	99.948.144	
1.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.326.604.528	1.326.604.528	
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.178.600	129.276.978	
1.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	60.048.000	62.587.240	
1.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.130.600	66.689.738	
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.633.987.000	1.591.057.000	
1.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	
1.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	338.280.000	338.280.000	
1.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.285.687.000	1.242.787.000	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	991.810.640	1.389.959.640	
1.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.755.600	43.755.600	
1.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.982.800	36.982.800	
1.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.650.000	43.650.000	
1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	166.422.240	166.422.240	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Beaudah	
1	2	3	4	5
1.04.01.1.09.11	Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	861.000.000	1.099.149.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	800.741.520	368.201.400	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	628.789.200	339.839.400	
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	282.321.700	154.578.000	
1.04.02.1.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	259.005.000	150.197.000	
1.04.02.1.01.08	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	107.472.500	35.064.400	
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	171.942.320	28.362.000	
1.04.02.1.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	171.942.320	28.362.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.161.189.282	8.205.771.785	
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	300.000.000	264.582.500	
1.04.03.1.01.02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	200.000.000	221.378.000	
1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	100.000.000	43.204.500	
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	7.861.189.282	7.941.189.285	
1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	7.326.189.282	7.406.189.285	
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	535.000.000	535.000.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	168.198.156.713	181.654.210.383	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	168.198.156.713	181.654.210.383	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Pemukiman untuk Menunjang Fungsi Pemukiman	168.198.156.713	181.854.210.383	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	38.674.230.914	41.583.881.727	
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	25.153.872.642	28.151.079.516	
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	25.153.872.642	28.151.079.516	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.683.145.847	23.409.368.422	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.370.727	193.312.968	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.486.909	92.239.200	
1.05.01.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.903.818	103.079.768	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.918.916.080	13.065.501.771	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.408.786.080	12.592.695.771	
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	490.130.000	442.718.000	
1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	30.088.000	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	168.031.400	205.444.360	
1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	168.031.400	205.444.360	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	811.578.180	1.322.504.910	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.175.200	10.175.200	
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.144.450	502.482.450	
1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.485.100	19.862.600	
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.878.000	38.878.000	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.582.800	41.212.100	
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.877.100	9.877.100	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	417.140.100	875.724.060	
1.05.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.493.400	24.493.400	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	864.923.125	1.284.114.125	
1.05.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	574.322.500	1.003.513.500	
1.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	290.600.625	290.600.625	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.816.313.173	5.811.493.096	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.374.845	169.296.490	
1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.857.100	21.857.100	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.727.081.228	5.620.339.506	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	844.015.182	1.514.895.182	
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.510.000	103.510.000	
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193.884.012	244.170.412	
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.547.100	21.547.100	
1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	525.074.080	1.145.767.680	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.827.057.024	4.158.996.193	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.434.102.002	3.773.766.171	
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	937.324.008	1.175.427.008	
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	377.427.330	377.427.330	
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	67.715.570	414.594.739	
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	350.000.000	812.456.700	
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan	123.195.894	159.946.894	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia			
1.05.02.1.01.06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	26.362.000	26.362.000	
1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterliban Umum	547.077.400	748.585.320	
1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Keterliban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		53.968.380	
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000	5.000.000	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	341.667.084	333.942.084	
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	39.324.288	39.324.268	
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	270.390.381	270.390.381	
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	31.952.435	24.227.435	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	51.287.938	51.287.938	
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	51.287.938	51.287.938	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	673.668.771	582.716.901	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	608.881.215	517.928.346	
1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	92.950.870	92.950.870	
1.05.04.1.01.02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	87.860.695	87.860.695	
1.05.04.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	243.075.381	243.075.381	
1.05.04.1.01.13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	121.478.770	94.041.400	
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	64.788.555	64.788.555	
1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan,	64.788.555	64.788.555	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.390.358.272	13.432.802.211	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.390.358.272	13.432.802.211	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.628.515.272	8.455.979.080	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.216.480	207.731.297	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.892.535	96.458.793	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.326.820	25.401.409	
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.997.135	85.871.095	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.075.918.868	5.794.428.883	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.700.774.888	5.437.606.883	
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	375.144.000	356.822.000	
1.05.01.1.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	47.172.500	81.511.700	
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.972.500	61.951.700	
1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.200.000	19.560.000	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	427.936.090	563.683.978	
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.337.040	139.714.769	
1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.012.649	5.555.550	
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.095.189	41.598.427	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.268.060	5.664.730	
1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	16.710.162	16.710.162	
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.300.000	26.380.000	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.212.990	328.259.340	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.188.700	150.188.700	
1.05.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.188.700	150.188.700	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.458.882.934	1.445.812.354	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.039.522	9.039.522	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	120.172.670	
1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.443.220	3.400.000	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.314.200.192	1.314.200.192	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.399.690	211.422.139	
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.529.690	150.474.829	
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.870.000	24.930.790	
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	36.016.519	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.851.843.000	4.976.623.131	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.355.000.000	1.088.084.544	
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1.355.000.000	1.088.084.644	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.256.168.313	1.646.454.272	
1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	605.000.000	586.953.650	
1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	46.075.731	98.185.155	
1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	212.000.000	224.858.167	
1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	55.000.000	55.000.000	
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	200.000.000	450.000.000	
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	71.092.582	141.637.300	
1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	77.000.000	91.820.000	
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.430.674.667	1.494.323.778	
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	536.231.687	721.722.200	
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300.000.000	580.309.233	
1.05.03.1.03.08	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	592.443.000	192.292.345	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	810.000.000	746.980.437	
1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	180.000.000	180.000.000	
1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	575.000.000	510.980.437	
1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	55.000.000	55.000.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	25.401.498.324	26.817.027.836	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	25.401.498.324	26.817.027.836	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	25.401.498.324	26.817.027.836	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.671.049.240	12.262.695.551	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	PROVINSI			
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	686.027.059	686.027.059	
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.854.652	26.854.652	
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	222.960.611	180.710.611	
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	197.635.296	197.635.296	
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	238.576.500	280.826.500	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.745.758.255	9.287.404.596	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.202.910.255	8.763.384.596	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	542.848.000	524.020.000	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	68.474.096	68.474.096	
1.06.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	68.474.096	68.474.096	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000	50.000.000	
1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Ambul Kelengkapannya	50.000.000	50.000.000	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	769.991.211	759.270.211	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.030.000	13.030.000	
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.638.200	30.638.200	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.859.682	76.859.682	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.590.000	84.590.000	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.800.000	10.800.000	
1.06.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	16.730.000	6.009.000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	537.343.329	537.343.329	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.897.523	238.897.523	
1.06.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.920.000	77.920.000	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.977.523	158.977.523	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	886.324.096	896.045.096	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.000.000	39.721.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	80.000.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	776.324.096	776.324.096	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.577.000	278.577.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	188.107.000	188.107.000	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.470.000	47.470.000	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.000.000	43.000.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.945.969.096	4.363.419.731	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	2.945.969.096	4.363.419.731	
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	100.000.000	85.000.000	
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	238.360.000	238.360.000	
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	2.607.609.096	4.040.059.731	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.386.620.048	2.852.220.477	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar di dalam Pantl	757.737.648	1.169.546.127	
1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	485.079.048	585.079.048	
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	272.658.600	584.487.079	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terantar di dalam Pantl	968.815.400	968.815.400	
1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	403.171.400	403.171.400	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	566.644.000	566.644.000	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terantar di dalam Pantl	351.785.000	393.377.950	
1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	173.164.000	173.164.000	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	178.622.000	220.213.950	
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pantl	142.785.000	142.785.000	
1.06.04.1.04.03	Penyediaan Asrama/Warna yang Mudah Diakses	90.989.000	90.989.000	
1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	51.796.000	51.796.000	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantl	176.696.000	176.696.000	
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	53.916.000	53.916.000	
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	122.780.000	122.780.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.06.06	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.454.154.740	5.292.186.647	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	5.454.154.740	5.292.186.647	
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.865.849.048	3.700.186.655	
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	705.492.192	705.492.192	
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	883.013.500	886.528.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	669.025.200	609.025.200	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	559.025.200	609.025.200	
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Pemakanan	220.362.000	220.362.000	
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	154.904.000	154.904.000	
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	37.194.200	37.194.200	
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	146.565.000	196.565.000	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.372.480.000	1.437.480.000	
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.372.480.000	1.437.480.000	
1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.372.480.000	1.437.480.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	29.176.154.780	29.679.396.203	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	29.176.154.780	29.679.396.203	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	25.120.901.348	25.806.906.825	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.331.968.680	24.422.964.067	
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	70.000.000	
2.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	
2.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	25.000.000	
2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.287.421.021	22.338.427.114	
2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.674.461.021	21.844.507.114	
2.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	612.960.000	493.920.000	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.482.625	344.032.625	
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	
2.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	20.000.000	
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.616.702	26.161.702	
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.394.323	10.394.323	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.607.200	9.607.200	
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.844.400	265.869.400	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	263.857.000	253.857.000	
2.07.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	198.996.000	198.996.000	
2.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.861.000	54.861.000	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.206.606.144	1.204.571.528	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	254.605.000	212.671.000	
2.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.070.000	35.070.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	916.831.144	956.830.528	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.711.800	212.075.800	
2.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.546.000	101.010.000	
2.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.061.800	10.061.800	
2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.004.000	101.004.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	20.000.000	20.000.000	
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	20.000.000	20.000.000	
2.07.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	20.000.000	20.000.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	290.000.000	865.000.000	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	270.000.000	865.000.000	
2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	270.000.000	865.000.000	
2.07.03.1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	20.000.000	20.000.000	
2.07.03.1.03.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	20.000.000	20.000.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	84.999.600	84.999.600	
2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.999.600	24.999.600	
2.07.04.1.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	24.999.600	24.999.600	
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	20.000.000	20.000.000	
2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	20.000.000	20.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	20.000.000	20.000.000	
2.07.04.1.04.03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	20.000.000	20.000.000	
2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000	20.000.000	
2.07.04.1.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000	20.000.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	319.943.158	319.943.158	
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	146.898.726	146.898.726	
2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	146.898.726	146.898.726	
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	173.044.432	173.044.432	
2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	57.292.100	57.292.100	
2.07.05.1.03.03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	115.752.332	115.752.332	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	74.000.000	74.000.000	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	74.000.000	74.000.000	
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	25.000.000	25.000.000	
2.07.06.1.01.02	Pengawasan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	25.000.000	25.000.000	
2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	24.000.000	24.000.000	
2.07.3.32.0.00.02.0001	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau	3.672.248.192	3.489.484.138	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	182.248.192	182.248.192	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.000.000	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.248.192	177.248.192	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.300.000	44.300.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.948.192	132.948.192	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA	3.490.000.000	3.307.236.948	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	5
	KERJA			
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	3.480.000.000	3.307.235.946	
2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	3.480.000.000	3.307.235.946	
2.07.3.32.0.00.02.0002	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun	58.457.048	58.457.048	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.457.048	58.457.048	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.000.000	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.457.048	53.457.048	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.220.000	20.220.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.237.048	33.237.048	
2.07.3.32.0.00.02.0003	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam	324.648.192	324.648.192	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	194.948.192	189.818.192	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.000.000	7.000.000	
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	7.000.000	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.948.192	178.818.192	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000	45.870.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.948.192	132.948.192	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	129.600.000	138.730.000	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	129.600.000	138.730.000	
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	129.600.000	138.730.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18.615.028.993	20.035.806.474	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	18.615.028.993	20.035.806.474	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	17.127.622.941	18.466.186.622	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.915.259.384	12.983.342.845	
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	205.390.389	205.390.389	

Urutan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
2.08.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	155.236.464	155.236.464	
2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.153.925	50.153.925	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.766.358.678	9.322.108.944	
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.180.045.178	8.788.898.549	
2.08.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	595.368.000	528.469.195	
2.08.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.945.500	4.747.200	
2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.440.000	58.820.473	
2.08.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	58.440.000	58.820.473	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	658.624.300	996.549.300	
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.320.800	11.320.800	
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.148.000	58.598.900	
2.08.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.088.000	25.088.000	
2.08.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.840.000	81.840.000	
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	106.401.000	510.201.000	
2.08.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000	27.000.000	
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.828.500	284.500.600	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.163.665.227	2.242.445.539	
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.452.623	153.212.622	
2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.200.000	123.060.000	
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.927.912.604	1.966.172.917	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.380.000	168.030.000	
2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.380.000	168.030.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.057.980.000	1.057.980.000	
2.08.02.1.01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	72.980.000	72.980.000	
2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	72.980.000	72.980.000	
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan	650.000.000	650.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Ekonomi pada Organisasi Komasyarakatan Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	200.000.000	200.000.000	
2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	450.000.000	450.000.000	
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	335.000.000	335.000.000	
2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	335.000.000	335.000.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	756.660.000	756.660.000	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota	555.000.000	555.000.000	
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	555.000.000	555.000.000	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	201.660.000	201.660.000	
2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	101.660.000	101.660.000	
2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	100.000.000	100.000.000	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.344.020.733	2.596.434.963	
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1.300.000.000	2.552.414.230	
2.08.04.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan	100.000.000	100.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
	KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			
2.08.04.1.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1.200.000.000	2.452.414.230	
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	44.020.733	44.020.733	
2.08.04.1.02.03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	44.020.733	44.020.733	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	10.000.000	10.000.000	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	10.000.000	10.000.000	
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	10.000.000	10.000.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	594.102.814	653.382.814	
2.08.06.1.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	594.102.814	653.382.814	
2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	521.122.914	580.402.914	
2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	72.979.900	72.979.900	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	448.500.000	387.385.200	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	349.500.000	287.385.200	
2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	200.000.000	200.000.000	
2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	149.500.000	87.385.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Kel
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000	100.000.000	
2.08.07.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	100.000.000	100.000.000	
2.08.2.14.0.00.01.0001	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1.487.506.052	1.580.820.852	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	438.580.052	468.580.052	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.611.052	105.610.052	
2.08.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.367.100	4.351.100	
2.08.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.531.000	14.546.000	
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	71.712.952	71.712.952	
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	15.000.000	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.934.000	287.950.000	
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.950.000	68.950.000	
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.984.000	221.000.000	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.036.000	76.020.000	
2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.335.000	69.320.000	
2.08.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.700.000	6.700.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.048.828.000	940.200.800	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	62.114.800	
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	0	62.114.800	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.048.925.000	878.086.000	
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	702.086.000	702.088.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	346.840.000	176.000.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	170.840.000	
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	0	170.840.000	
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0	170.840.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	22.407.700.171	22.171.051.986	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	22.407.700.171	22.171.051.986	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	22.407.700.171	22.171.051.986	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.417.823.636	20.992.681.048	
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	222.937.278	270.436.368	
2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	153.610.078	167.193.278	
2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.927.200	103.242.090	
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.351.487.552	16.794.168.248	
2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.787.685.552	16.152.904.248	
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	563.802.000	641.252.000	
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.122.747.011	1.230.501.171	
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.256.525	8.256.525	
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	442.617.148	540.497.215	
2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.812.388	92.812.388	
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	159.764.495	159.764.495	
2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.007.615	8.007.615	
2.09.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	38.665.735	33.908.535	
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	372.623.125	387.253.418	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.276.116.471	2.251.674.011	
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.875.915	2.875.915	
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.035.765	100.594.305	

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sabelum	Seudah	
1	2	3	4	5
2.09.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.015.755	48.015.755	
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.100.188.036	2.100.188.036	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.526.224	446.914.250	
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	349.344.814	354.238.600	
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.025.760	71.520.000	
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.155.650	20.155.650	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	898.350.456	1.086.844.789	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyakuran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	623.082.230	700.178.510	
2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	30.567.202	30.567.202	
2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	592.515.028	669.611.308	
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	187.942.546	187.942.546	
2.09.03.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	147.095.590	147.095.590	
2.09.03.1.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	40.846.956	40.846.956	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	87.325.680	198.723.713	
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	87.325.680	198.723.713	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	32.178.738	32.178.738	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	32.178.738	32.178.738	
2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	32.178.738	32.178.738	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	59.347.441	59.347.441	
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	59.347.441	59.347.441	
2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	25.694.126	25.694.126	
2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	33.653.315	33.653.315	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3.693.237.049	3.693.237.049	
1.03.2.10.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3.693.237.049	3.693.237.049	
1.03.2.10.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3.693.237.049	3.693.237.049	
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	3.693.237.049	3.693.237.049	
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	3.693.237.049	3.693.237.049	
2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	3.693.237.049	3.693.237.049	
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	30.433.896.596	31.139.818.590	
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.433.896.596	31.139.818.590	
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.094.756.284	30.860.678.278	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.126.063.644	29.660.148.938	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.608.400	144.763.056	
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.531.100	78.578.756	
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.077.300	66.186.300	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.780.520.320	25.142.743.415	
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.988.756.120	25.602.581.415	
2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	771.864.200	540.162.000	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.906.000	80.308.843	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.906.000	80.308.843	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	713.939.300	794.409.000	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.997.300	5.997.300	
2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.205.200	21.205.200	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.850.700	86.788.400	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.417.900	64.417.900	
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	122.313.600	122.313.600	
2.11.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	19.864.800	20.259.800	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	396.700.000	486.843.000	
2.11.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.589.800	6.589.800	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.101.627.624	2.087.677.624	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.200.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.247.600	12.497.600	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.072.980.024	2.072.980.024	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.362.000	410.249.000	
2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	368.872.000	364.909.000	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.490.000	45.340.000	
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	514.140.835	439.140.835	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	514.140.835	439.140.835	
2.11.02.1.02.04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	514.140.835	439.140.835	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	250.000.000	250.000.000	
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	250.000.000	250.000.000	
2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	250.000.000	250.000.000	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	41.600.700	55.240.700	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	41.600.700	55.240.700	
2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	41.600.700	55.240.700	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	122.889.305	246.147.805	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	122.889.305	246.147.805	
2.11.11.1.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	122.889.305	246.147.805	
2.11.3.26.0.00.02.0001	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	339.140.312	489.140.312	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	339.140.312	489.140.312	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	25.000.000	
2.11.01.1.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.713.512	380.537.612	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.994.800	2.994.800	
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.587.560	214.167.080	
2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.873.200	32.873.200	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.819.000	16.287.800	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.164.388	2.164.388	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	58.954.588	62.305.066	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.960.000	8.250.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.360.000	41.495.300	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.426.800	83.602.700	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.576.000	31.911.900	
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.850.800	51.690.800	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.729.842.236	2.051.624.168	
2.12.2.13.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.729.842.236	2.051.624.168	
2.12.2.13.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.729.842.236	2.051.624.168	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	501.372.000	501.372.000	
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	269.000.000	269.000.000	
2.12.02.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	269.000.000	269.000.000	
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	232.372.000	232.372.000	
2.12.02.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	232.372.000	232.372.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	110.000.000	153.869.500	
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	110.000.000	153.869.500	
2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	110.000.000	153.869.500	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.083.270.236	1.361.182.668	
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	1.083.270.236	1.361.182.668	
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.000.000.036	1.306.318.868	
2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	83.270.200	54.865.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	35.200.000	35.200.000	
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	35.200.000	35.200.000	
2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	35.200.000	35.200.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBEROAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	35.903.185.722	39.311.262.740	
2.12.2.13.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.903.185.722	39.311.262.740	
2.12.2.13.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.903.185.722	39.311.262.740	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.451.765.569	11.861.061.509	
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.889.885	145.889.850	
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.870.230	27.384.400	
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.276.550	48.124.550	
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.743.105	70.380.700	
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.408.076.612	8.308.960.169	
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.068.102.612	7.722.482.159	
2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	325.974.000	569.498.000	
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	15.000.000	
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	9.500.000	239.821.400	
2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		239.821.400	
2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.000.000	9.000.000	
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.140.977.100	1.344.378.600	
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000	6.500.000	
2.13.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.115.700	105.973.600	
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.445.000	37.563.600	
2.13.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	412.590.400	412.420.400	
2.13.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.938.000	7.500.000	
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	532.388.000	774.421.000	
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.533.000	169.841.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.13.01.1.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.533.000	189.841.800	
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.482.085.172	1.462.161.300	
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.501.000	9.501.000	
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.005.500	31.695.000	
2.13.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.940.000	53.900.000	
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.375.618.672	1.367.065.300	
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.223.800	192.028.800	
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.223.800	153.778.800	
2.13.01.1.08.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	38.250.000	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	128.478.000	80.897.576	
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelambagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	128.478.000	80.897.576	
2.13.02.1.01.03	Facilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	128.478.000	80.897.576	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	224.192.500	224.192.248	
2.13.03.1.01	Facilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	224.192.500	224.192.248	
2.13.03.1.01.03	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	224.192.500	224.192.248	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	789.547.386	789.547.386	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	789.547.386	789.547.386	
2.13.04.1.01.08	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	201.350.000	201.350.000	
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	537.699.986	537.699.986	
2.13.04.1.01.16	Facilitasi Penetapan dan Penegakan Batas Desa	50.497.400	50.497.400	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	23.309.202.267	26.355.544.021	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	23.309.202.267	26.355.544.021	
2.13.05.1.01.02	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan	18.827.706.467	22.133.446.495	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	149.250.000	149.250.000	
2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.287.000.000	1.187.000.000	
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	408.096.000	408.096.000	
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	497.752.000	497.752.000	
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.000.000.000	1.999.999.526	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	485.958.800	835.958.800	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	485.958.800	835.958.800	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	485.958.800	835.958.800	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.000.000	10.000.000	
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	10.000.000	10.000.000	
2.14.03.1.01.04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	10.000.000	10.000.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	445.958.800	825.958.800	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	445.958.800	825.958.800	
2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	300.000.000	300.000.000	
2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan	145.958.800	345.958.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK			
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	10.000.000	180.000.000	
2.14.04.1.02.02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	10.000.000	180.000.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	80.830.594.776	83.864.348.958	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	80.830.594.776	83.864.348.958	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	78.718.991.903	81.582.304.192	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.024.887.342	19.209.207.605	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264.658.083	376.909.758	
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264.658.083	376.909.758	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.557.557.363	11.853.473.680	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gap dan Tunjangan ASN	10.602.300.471	10.877.713.584	
2.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	840.886.000	834.521.000	
2.15.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	114.370.892	141.238.998	
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79.714.000	99.062.000	
2.15.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	79.714.000	99.062.000	
2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100.179.120	100.085.520	
2.15.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100.179.120	100.085.520	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.936.500	142.380.992	
2.15.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	78.290.000	103.511.892	
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.149.000	38.869.000	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.491.775.046	1.523.079.771	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	2.844.020	
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	365.335.446	299.543.500	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	118.250.000	93.000.000	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000	
2.15.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.020.000	142.200.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	835.169.600	935.892.251	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	259.196.200	1.104.697.200	
2.15.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	741.800.000	
2.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	-	63.825.000	
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.196.200	224.272.200	
2.15.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	75.000.000	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.676.490.024	2.660.397.880	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	26.009.600	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.040.024	138.040.024	
2.15.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.000.000	192.000.000	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.303.450.000	2.298.348.056	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.466.483.006	1.369.121.008	
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	512.827.200	406.465.200	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.200.000	128.200.000	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.705.806	54.705.808	
2.15.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	271.750.000	271.750.000	
2.15.01.1.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	500.000.000	500.000.000	
1	2	3,00	4,00	4
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.550.000.000	7.550.000.000	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	880.000.000	880.000.000	
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	880.000.000	880.000.000	
2.15.02.1.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	5.254.147.000	5.254.147.000	
2.15.02.1.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	5.100.000.000	5.100.000.000	
2.15.02.1.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	154.147.000	154.147.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	100.000.000	100.000.000	
2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	100.000.000	100.000.000	
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	465.904.500	465.904.500	
2.15.02.1.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	465.904.500	465.904.500	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	750.000.000	750.000.000	
2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	750.000.000	750.000.000	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	99.948.500	99.948.500	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	99.948.500	99.948.500	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	53.144.004.681	54.823.096.687	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	318.776.000	448.015.000	
2.15.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	318.776.000	448.015.000	
2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	107.801.000	107.801.000	
2.15.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	107.801.000	107.801.000	
2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan	187.811.900	187.811.900	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan			
2.15.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	187.811.900	187.811.900	
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Peraliran Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	130.599.000	100.360.000	
2.15.03.1.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Peraliran Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	130.599.000	100.360.000	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	62.389.018.861	53.978.108.787	
2.15.03.1.09.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1.017.183.800	1.017.183.800	
2.15.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	45.277.467.998	7.566.427.558	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	6.104.364.862	45.394.497.431	
2.15.0.00.0.00.01.0001	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam	333.145.158	341.825.404	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	230.626.500	239.306.745	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.626.500	239.306.745	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.626.500	239.306.745	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	102.518.659	102.518.659	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	102.518.659	102.518.659	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	102.518.659	102.518.659	
2.15.0.00.0.00.01.0002	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	399.457.500	399.133.432	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	259.457.500	299.133.432	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.457.500	299.133.432	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.457.500	299.133.432	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	100.000.000	100.000.000	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	100.000.000	100.000.000	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Regional	100.000.000	100.000.000	
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	723.109.000	789.088.007	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	605.109.000	671.089.237	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.109.000	671.089.237	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	605.109.000	671.089.237	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	118.000.000	117.998.770	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	118.000.000	117.998.770	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Regional	118.000.000	117.998.770	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	420.114.530	447.449.491	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	259.535.000	286.868.981	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.535.000	286.868.981	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.535.000	286.868.981	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	160.579.530	160.579.530	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	160.579.530	160.579.530	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Regional	160.579.530	160.579.530	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	275.776.564	304.549.430	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	144.324.500	173.098.648	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.324.500	173.098.648	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.324.500	173.096.548	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	131.452.184	131.450.884	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	131.452.184	131.450.884	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	131.452.184	131.450.884	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	45.521.071.411	52.416.972.924	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	45.521.071.411	52.416.972.924	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	45.521.071.411	52.416.972.924	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.627.241.590	12.642.865.176	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.143.763	180.626.753	
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.008.000	90.008.000	
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	94.135.763	90.618.763	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.757.862.071	9.544.784.884	
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.235.714.571	9.008.159.184	
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	521.947.500	536.625.500	
2.16.01.1.03	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	30.801.263	25.964.000	
2.16.01.1.03.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.801.263	25.964.000	
2.16.01.1.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.373.473	453.886.649	
2.16.01.1.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.736.000	9.736.000	
2.16.01.1.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.998.700	
2.16.01.1.05.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.812.100	29.812.100	
2.16.01.1.05.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.865.765	61.573.700	
2.16.01.1.05.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.312.800	9.664.400	
2.16.01.1.05.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	18.000.000	13.600.000	
2.16.01.1.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.546.808	319.503.749	
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	158.000.000	
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	158.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.353.281.080	2.353.281.080	
2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.161.800	42.161.800	
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.311.099.280	2.311.099.280	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.000.000	126.340.000	
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	113.580.000	
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	11.760.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	26.020.110.873	31.017.924.243	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	26.020.110.873	31.017.924.243	
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	121.870.682	137.640.682	
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.241.720.378	1.464.325.288	
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.854.879.837	3.444.654.397	
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	150.542.580	201.135.120	
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	11.034.840.604	14.110.106.355	
2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	8.059.417.354	8.903.489.193	
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	150.000.000	2.031.880	
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	949.503.428	884.858.428	
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	765.000.000	765.000.000	
2.16.02.1.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.692.336.000	3.104.702.900	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.873.718.858	8.556.183.506	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	6.028.902.520	9.066.276.912	
2.16.03.1.01.02	Penataleaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	106.717.280	114.258.788	
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.920.185.240	4.952.020.124	
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.844.816.358	3.489.906.583	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	89.591.007	89.591.007	
2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	161.767.902	161.773.723	
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	451.826.176	2.076.006.564	
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	108.094.243	121.458.751	
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	944.752.096	950.291.604	
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	39.775.885	39.775.885	
2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	51.009.059	51.009.059	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	24.674.062.444	20.679.328.848	
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24.674.062.444	20.679.328.848	
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24.674.062.444	20.679.328.848	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.342.802.911	13.840.364.716	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	311.050.542	335.115.542	
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96.183.000	122.248.000	
2.17.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	43.974.867	43.974.867	
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.921.000	57.921.000	
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.971.675	110.971.675	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.860.163.083	8.016.542.420	
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.347.763.083	7.481.784.775	
2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	432.420.000	454.757.645	
2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	80.000.000	80.000.000	
2.17.01.1.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.642.600	81.642.600	
2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58.642.600	58.642.600	
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	25.000.000	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.317.736.079	2.608.766.479	
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.626.700	27.626.700	
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.210.000	15.210.000	
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.364.095	119.364.095	
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	288.000.000	383.000.000	
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	432.983.289	498.213.689	
2.17.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.424.551.995	1.575.351.995	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.000.000	39.000.000	
2.17.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.000.000	39.000.000	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.581.645.607	2.587.752.674	
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	25.000.000	
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	48.000.000	
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.470.645.607	2.496.752.674	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.545.000	171.545.000	
2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.775.000	148.775.000	
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.770.000	24.770.000	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	280.795.733	353.265.733	
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.157.733	222.657.733	
2.17.02.1.01.01	Facilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.157.733	222.657.733	
2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	130.638.000	130.638.000	
2.17.02.1.02.02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	130.638.000	130.638.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	99.678.000	99.678.000	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah	99.678.000	99.678.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kual, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	99.678.000	99.678.000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	40.000.000	40.000.000	
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000	40.000.000	
2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	40.000.000	40.000.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.264.530.000	1.374.530.000	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	340.000.000	340.000.000	
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	340.000.000	340.000.000	
2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	914.530.000	1.034.530.000	
2.17.05.1.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	914.530.000	1.034.530.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	5.064.034.000	441.634.000	
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.064.034.000	441.634.000	
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	365.000.000	315.000.000	
2.17.06.1.01.03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	199.034.000	126.534.000	
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.684.551.800	2.822.256.400	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan	2.684.551.800	2.822.256.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2.884.551.800	2.822.256.400	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.907.670.000	1.707.670.000	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	1.807.670.000	1.707.670.000	
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.599.839.000	1.399.839.000	
2.17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	307.831.000	307.831.000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	17.330.728.481	17.484.081.029	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	17.330.728.481	17.484.081.029	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	17.330.728.481	17.484.081.029	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.636.870.411	14.400.022.969	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	423.511.437	443.611.437	
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	276.197.700	276.197.700	
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.187.037	55.832.237	
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.226.700	111.581.500	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.487.309.278	10.073.181.828	
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.964.403.478	9.575.336.026	
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	511.310.000	486.230.000	
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.595.800	11.595.800	
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.347.248	33.347.248	
2.18.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	33.347.248	33.347.248	
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	277.170.700	277.170.700	
2.18.01.1.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	100.000.000	
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	177.170.700	177.170.700	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	518.800.897	722.480.886	
2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	9.000.000	
2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.218.800	72.218.800	
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.860.000	14.860.000	
2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraluan Perundang-Undangan	28.250.400	21.393.200	
2.18.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	21.753.333	21.753.333	
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	372.718.364	583.255.553	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.100.918.854	1.101.696.365	
2.18.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	594.829.133	600.210.724	
2.18.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	506.289.721	501.485.641	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.604.168.301	1.566.210.801	
2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	133.058.392	133.058.392	
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.723.525	201.216.025	
2.18.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.340.000	79.140.000	
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.168.046.384	1.152.796.384	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.343.696	182.343.696	
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.920.448	136.920.448	
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.076.000	12.076.000	
2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.347.248	33.347.248	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	576.800.392	586.800.392	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	423.800.392	433.800.392	
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	423.800.392	433.800.392	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	153.000.000	153.000.000	
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	153.000.000	153.000.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	413.471.000	513.471.000	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi	413.471.000	513.471.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Kewenangan Daerah Provinsi			
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	413.471.000	513.471.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	651.975.050	831.976.050	
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	120.602.580	160.602.550	
2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	41.184.850	81.184.850	
2.18.04.1.01.02	Pemantauan Penuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	79.417.700	79.417.700	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraluran Perundangan-Undangan	531.372.500	771.372.500	
	Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	54.601.000	94.601.000	
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Penuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	63.800.000	63.800.000	
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	252.000.000	452.000.000	
2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	160.971.500	160.971.500	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	962.296.528	962.296.528	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	962.296.528	962.296.528	
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	439.494.528	804.796.528	
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	357.500.000	357.500.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	89.515.100	89.515.100	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	PENANAMAN MODAL			
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	89.515.100	89.515.100	
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	89.515.100	89.515.100	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	48.817.001.115	52.125.805.314	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	45.817.001.115	52.125.805.314	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	45.817.001.115	52.125.805.314	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.915.526.943	15.714.583.190	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	198.170.199	

[https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ObjSvVoso@OPmA8UBgltendX7ytwz8B1eWK4eStRTbWAXRoj6nsx5TnCUzqDI37JABpQv4/b92/MK2EH2RVABHEF44sQZvJX/ixRdSxRHxbw7O/wxSDnkRz/...](https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ObjSvVoso@OPmA8UBgltendX7ytwz8B1eWK4eStRTbWAXRoj6nsx5TnCUzqDI37JABpQv4/b92/MK2EH2RVABHEF44sQZvJX/ixRdSxRHxbw7O/wxSDnkRz/) 74/178

8/30/23, 11:10 PM

Sistem informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3,00	4,00	4
2.19.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	56.804.600	
2.19.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.000.000	141.365.599	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.600.402.587	9.311.508.943	
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.832.886.787	8.570.679.139	
2.19.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	944.925.400	716.918.404	
2.19.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.790.400	23.912.400	
2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	299.826.732	299.133.432	
2.19.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	299.826.732	299.133.432	
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.622.200	10.622.200	
2.19.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.622.200	10.622.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.786.453.478	2.081.055.447	
2.19.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.942.164	485.474.870	
2.19.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.744.597	47.042.700	
2.19.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	87.888.800	
2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	390.000.000	390.973.800	
2.19.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	10.000.000	
2.19.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	16.622.100	
2.19.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	938.766.717	1.043.053.177	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.250.610.166	1.250.610.166	
2.19.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	199.982.000	199.982.000	

<https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ObISvVoso@OPmA8UBgtendX7ytwz8B1eWK4eSfRTbWAXRqj6nsx5TnCUzqDk37JABpQv4/b92/Mk2En2RVABHEF44sQZvJX/ixRdSxRHxbw7Q/wxSDnkRz/...> 75/178

8/30/23, 11:10 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3,00	4,00	4
2.19.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	100.000.000	
2.19.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	950.648.168	950.648.168	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.287.812.780	2.139.299.891	
2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	337.370.480	337.370.480	
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.000.000	203.967.441	
2.19.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	62.540.000	
2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.686.442.300	1.535.421.970	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.000.000	424.161.912	
2.19.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	324.161.912	
2.19.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000	100.000.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.737.426.000	3.043.156.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.737.425.000	3.043.155.000	
2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	200.000.000	570.951.500	
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	99.758.500	99.758.500	
2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	784.517.000	749.517.000	
2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.354.840.000	1.324.618.500	
2.19.02.1.01.08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	99.517.000	99.517.000	

<https://keprnprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ObISvVoso@OPmA8UBgltendX7ytwz8B1eWK4eSfRTbWAXRoj6nsx5TnCUzqDI37JABpQv4/b92/Mk2Eh2RVABHEF44sOZvJX/urRdSxRHxbw7OwxsDnRz/...> 78/178

8/30/23, 11:10 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3,00	4,00	4
	Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi			
2.19.02.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	198.792.500	198.792.500	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	25.984.049.172	32.028.537.124	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	5.638.893.672	6.424.128.824	
2.19.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	2.287.800.000	2.308.170.000	
2.19.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan	785.318.672	732.081.624	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus			
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	2.585.775.000	2.383.875.000	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	7.181.055.500	8.093.310.500	
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	5.646.063.500	6.746.063.500	
2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	1.534.992.000	1.347.247.000	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	354.100.000	354.100.000	
2.19.03.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	105.000.000	105.000.000	
2.19.03.1.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	249.100.000	249.100.000	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	12.790.000.000	18.157.000.000	
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	12.790.000.000	18.157.000.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.200.000.000	1.339.550.000	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.200.000.000	1.339.550.000	

<https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ObtSvVoso@OPmA8UBgitendX7ytwz8B1eVVK4eSfRTbWAXRqj6nxs5TnCUzqDl37JABpQv4/b92/Mk2Eh2RVABHEF44sOZvJX/ixRdSdRHxbw7Q/wxSDnkRz/...> 77/178

8/30/23, 11:10 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3,00	4,00	4
2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1.200.000.000	1.339.550.000	
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	118.954.678	120.929.678	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	118.954.678	120.929.678	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	118.954.678	120.929.678	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	118.954.678	120.929.678	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	118.954.678	120.929.678	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	118.954.678	120.929.678	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	317.744.458	320.490.558	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	317.744.458	320.490.558	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	317.744.458	320.490.558	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	317.744.458	320.490.558	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	255.990.264	248.736.364	
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	255.990.264	248.736.364	
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	61.754.194	71.754.194	
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	61.754.194	71.754.194	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	20.131.448.632	19.615.313.301	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	20.131.448.632	19.615.313.301	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	20.131.448.632	19.615.313.301	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.258.423.976	12.110.528.331	

<https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ObISvVoso@OPmABUBgitendX7ytwz8B1eWK4eSfRTbWAXRoj6nsx5TnCUzqDI37JABpQv4/b9Z/Mk2Eh2RVABHEF44sOZvJXixRdSxRHxbw7O/wxSDmkRz/...> 78/178

8/30/23, 11:10 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3,00	4,00	4
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	359.893.033	369.098.293	
2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	285.144.833	275.115.358	
2.22.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.748.400	94.882.935	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.614.059.588	8.198.648.963	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	5
2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.089.303.589	7.753.060.953	
2.22.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	530.756.000	445.488.000	
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.501.500	47.501.500	
2.22.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.001.500	35.001.500	
2.22.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.500.000	12.500.000	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	745.633.144	928.518.981	
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.321.100	42.041.100	
2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	285.668.844	285.940.744	
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.128.000	51.795.400	
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.920.000	29.920.000	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.595.400	470.821.747	
2.22.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48.000.000	48.000.000	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	280.774.000	255.718.000	
2.22.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	280.774.000	255.718.000	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.930.133.618	1.885.048.502	
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132.948.192	132.948.192	

<https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ObISvVoo@OPmABUBgjtendX7ytwz8B1eWK4eSfRTbWAXRoj6nsx5TnCUzqDk37JABpQv4/b92/Mk2Eh2RVABHEF44sQZvJX/ixRdSxRHxbw7Q/wxSDnkrZf/...> 79/178

8/30/23, 11:10 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	4
		3,00	4,00	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	602.253.330	609.633.330	
2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	28.000.000	
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.166.932.086	1.114.466.980	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.429.092	425.194.092	
2.22.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.720.000	74.720.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.950.000	23.950.000	
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.959.082	132.959.082	
2.22.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.800.000	193.565.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.150.344.048	3.030.344.048	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.193.219.048	1.193.219.048	
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	193.219.048	193.219.048	
2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.000.000.000	1.000.000.000	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1.937.125.000	1.837.125.000	
2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.834.749.000	1.534.749.000	
2.22.02.1.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	902.376.000	902.376.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.745.832.772	2.745.832.772	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.745.832.772	2.745.832.772	
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	121.584.976	121.584.976	

<https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ObISvVoso@OPmA8UBgJtendX7ytwz8B1eWK4eSfRTbWAXRoj6nsx5TnCUzqDk37JABpQv4bB2/Mk2Eh2RVABHEF44sOZvJX/ixRdSxRHxbw7O/wxSDnrRz/...> 80/178

8/30/23, 11:10 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3,00	4,00	4
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	49.000.000	49.000.000	
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.575.247.798	2.575.247.798	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	793.070.898	414.649.196	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	793.070.896	414.549.196	
2.22.04.1.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	111.918.498	33.237.048	
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	495.116.800	148.361.300	
2.22.04.1.01.04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	186.035.596	232.950.848	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	874.796.142	805.078.156	
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	123.317.618	123.317.618	
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	123.317.618	123.317.618	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	551.478.524	661.760.538	
2.22.05.1.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	180.628.596	310.910.610	
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	370.849.928	370.849.928	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	508.980.798	508.980.798	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	508.980.798	508.980.798	
2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	73.203.398	73.203.398	
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	435.777.400	435.777.400	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	19.592.153.775	19.725.072.178	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	19.592.153.775	19.725.072.178	

<https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ObISvVoso@OPmA8UBgJtendX7ytwz8B1eWK4aStRTbWAXRof6nsx5TnCUzqDi37JA8pQv4b92/Mk2Eh2RVABHEF44sOZvJXixRdSxRHxbw7O/wxSDnkRz/...> 81/178

8/30/23, 11:10 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3,00	4,00	4
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	18.968.473.685	19.121.392.088	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.528.083.741	17.441.028.530	
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.309.540	80.309.540	
2.23.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.309.540	80.309.540	

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.136.165.919	12.049.084.323	
2.23.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.696.865.919	11.609.784.323	
2.23.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	439.300.000	439.300.000	
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.685.000	21.395.900	
2.23.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000	10.000.000	
2.23.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.685.000	11.395.900	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	483.022.697	507.840.886	
2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	
2.23.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	87.517.490	
2.23.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	222.773.448	222.773.528	
2.23.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.511.949	11.511.949	
2.23.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.943.300	11.943.300	
2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.794.000	179.094.399	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	4.591.241.585	4.585.579.101	
2.23.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	832.891.585	827.879.101	
2.23.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.755.350.000	3.754.700.000	
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	216.659.000	198.819.000	
2.23.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.775.000	51.775.000	
2.23.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.884.000	60.024.000	
2.23.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	85.020.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.142.389.820	1.212.385.060	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	847.892.157	847.887.157	
2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	166.694.166	180.933.166	
2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	84.734.419	80.421.319	
2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	225.070.030	205.139.130	
2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	270.850.000	270.950.000	
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	100.243.542	100.243.542	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gamar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	294.697.663	364.697.903	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	260.324.898	330.325.138	
2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	34.372.765	34.372.765	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	318.000.124	467.978.498	
2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	318.000.124	317.978.498	
2.23.03.1.03.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	36.700.620	36.700.620	
2.23.03.1.03.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	281.299.504	281.277.878	
2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	0	150.000.000	
2.23.03.1.04.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	-	150.000.000	
2.23.2.24.0.00.02.0001	UPT PERPUSTAKAAN	603.680.090	603.680.090	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	603.680.090	603.680.090	
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-	7.500.000	
2.23.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	7.500.000	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.495.730	417.786.141	
2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.638.300	4.638.300	
2.23.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	287.510.100	270.226.500	
2.23.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.324.400	52.994.400	
2.23.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.950.830	20.087.341	
2.23.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.170.100	1.158.100	
2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.902.000	68.890.500	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.752.535	55.753.615	
2.23.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	753,50	1.253.500	
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.999.035	54.500.115	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Seudah	
1	2	3	4	5
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.431.826	122.640.334	
2.23.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.938.800	4.875.309	
2.23.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	104.075.025	104.075.025	
2.23.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.420.000	13.690.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	258.155.500	451.603.800	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	258.155.500	451.603.800	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	258.155.500	451.603.800	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	240.585.200	434.013.500	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	192.197.300	326.845.600	
2.24.02.1.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	23.058.200	218.504.500	
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	18.896.500	18.896.500	
2.24.02.1.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	90.444.600	90.444.600	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	43.242.400	43.242.400	
2.24.02.1.02.02	Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	43.242.400	43.242.400	
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	66.125.500	66.125.500	
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	23.320.500	23.320.500	
2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	41.805.000	41.805.000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	17.590.300	17.590.300	
2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	17.590.300	17.590.300	
2.24.03.1.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	17.590.300	17.590.300	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	62.273.122.403	61.363.918.491	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	62.273.122.403	61.363.918.491	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	62.273.122.403	61.363.918.491	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.858.736.803	28.241.082.408	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	609.031.027	552.874.175	
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	496.239.379	475.344.345	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.791.648	117.529.830	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.848.827.928	22.991.008.191	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.643.620.928	21.785.801.191	
3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.205.207.000	1.205.207.000	
3.25.01.1.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	190.274.000	182.294.160	
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	190.274.000	182.294.160	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	937.468.157	1.208.046.471	
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	104.872.776	104.872.776	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.118.447	90.951.467	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.778.500	25.277.320	
3.25.01.1.06.06	Facilitasi Kunjungan Tamu	24.450.000	38.510.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	701.248.444	948.434.908	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.930.624.281	2.948.657.011	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.756.000	39.440.000	
3.25.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	938.407.137	908.794.868	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.946.361.144	2.000.422.043	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.511.400	338.202.400	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	272.047.400	298.602.400	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.564.000	39.600.000	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.429.818.645	2.429.818.645	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.933.092.553	1.933.092.553	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1.933.092.553	1.933.092.553	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar	196.726.092	196.726.092	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Minyak dan Gas Bumi			
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	198.728.092	198.728.092	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300.000.000	300.000.000	
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300.000.000	300.000.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	13.170.788.297	13.554.787.769	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	12.944.493.649	13.278.737.615	
3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	35.518.900	35.518.900	
3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3.623.217.903	3.623.217.903	
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	9.285.756.746	9.620.000.712	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	139.640.200	139.640.200	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	139.640.200	139.640.200	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	86.634.548	136.410.054	
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	86.634.548	136.410.054	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.809.437.094	3.974.752.842	
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.603.339	3.603.339	
3.25.04.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	3.603.339	3.603.339	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.805.833.755	3.971.149.503	
3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.570.686	3.570.686	
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.286.159.787	1.269.447.463	
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	597.548.401	660.235.364	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	103.768.844	103.768.844	
3.25.04.1.05.08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.814.786.037	1.934.127.146	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.396.026.586	3.441.026.586	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Ml	3.396.026.586	3.441.026.586	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Ml	3.396.026.586	3.441.026.586	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	474.919.935	624.919.935	
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	174.482.887	174.482.887	
3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	113.750.288	113.750.288	
3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	60.732.601	60.732.601	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	300.437.048	450.437.048	
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	300.437.048	450.437.048	
3.25.0.00.0.00.01.0001	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS	371.707.829	357.859.059	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	337.971.621	319.536.750	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.842.239	43.400.239	
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000	3.500.000	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.233.239	2.233.239	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.109.000	37.667.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.129.282	278.136.511	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.489.946	9.325.945	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	280.659.336	268.810.566	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	33.736.308	38.322.309	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	33.736.308	38.322.309	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	33.736.308	38.322.309	
3.26.0.00.0.00.01.0002	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA	850.585.234	824.932.469	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	850.585.234	824.932.469	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.810.988	188.869.271	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.327.986	136.929.271	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.482.000	48.940.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661.782.628	612.065.480	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.825.000	24.845.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	637.957.528	587.220.480	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.982.718	26.977.718	
3.25.01.1.09.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.982.718	26.977.718	
3.25.0.00.0.00.01.0003	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA	1.083.812.922	1.049.964.152	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	973.803.294	894.388.624	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.597.188	46.199.012	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.597.188	46.199.012	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.541.111	34.541.111	
3.25.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.541.111	34.541.111	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.266.480	448.318.288	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	629.266.480	448.318.288	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.398.515	365.340.113	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.398.515	133.570.153	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	231.769.950	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	21.514.505	62.264.505	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	21.514.505	62.264.505	
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	21.514.505	62.264.505	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	32.321.854	32.321.854	
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	32.321.854	32.321.854	
3.25.03.1.10.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	32.321.854	32.321.854	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	36.173.269	60.979.269	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	36.173.269	60.979.269	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	25.616.269	25.616.269	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	10.557.000	35.363.000	
3.25.0.00.0.00.01.0004	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN	1.201.785.940	1.168.588.400	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	736.116.092	671.918.652	
3.25.01.1.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.775.604	19.775.604	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.251.200	6.251.200	
3.25.01.1.08.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.208.604	3.208.604	
3.25.01.1.08.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.315.800	10.315.800	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.320.488	648.122.948	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.398.200	50.398.200	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	660.922.288	597.724.748	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.020.000	4.020.000	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.020.000	4.020.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	222.698.788	222.698.788	
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	222.698.788	222.698.788	
3.25.03.1.10.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	222.698.788	222.698.788	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	243.971.060	273.971.060	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	243.971.060	273.971.060	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	243.971.060	273.971.060	
3.25.0.00.0.00.01.0005	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM	939.210.907	922.176.947	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	675.164.667	665.333.385	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.189.277	106.463.957	
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.981.800	6.544.200	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.425.429	27.078.629	
3.25.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.500.000	2.500.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.292.048	70.341.128	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.805.390	89.805.390	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	79.029.390	79.029.390	
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.776.000	10.776.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.160.000	459.064.036	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.010.000	68.502.918	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.150.000	390.561.120	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	170.918.192	163.829.914	
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	170.918.192	163.829.914	
3.25.03.1.10.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai	170.918.192	163.829.914	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	dengan 10 GT			
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	93.128.048	103.013.648	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	93.128.048	103.013.648	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	73.328.048	83.213.648	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	9.900.000	9.900.000	
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	9.900.000	9.900.000	
3.25.0.00.0.00.01.0008	UPTD BALAI BENIH IKAN	2.911.494.807	2.986.494.807	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.322.440.812	1.322.440.812	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.434.388	17.434.388	
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	2.000.000	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.434.388	9.434.388	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.253.170.480	1.253.170.480	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.800.000	258.800.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	995.370.480	995.370.480	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.835.944	51.835.944	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.835.944	51.835.944	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.589.053.995	1.644.053.995	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.589.053.995	1.644.053.995	
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.532.000.000	1.587.000.000	
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	57.053.995	57.053.995	
3.25.0.00.0.00.01.0007	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	708.616.371	700.302.295	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	634.387.240	618.167.404	
3.25.01.1.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.387.240	618.167.404	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.352.000	103.336.240	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	523.035.240	514.821.164	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	74.129.131	82.144.891	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	74.129.131	82.144.891	
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	23.864.381	35.773.175	
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	50.464.750	46.371.716	
3.25.0.00.0.00.01.0008	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI	1.086.301.033	1.107.212.177	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.045.034.426	1.019.845.570	
3.25.01.1.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.053.212	29.053.212	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.813.000	11.813.000	
3.25.01.1.08.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.240.212	17.240.212	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.016.981.214	990.892.358	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	529.821.878	529.821.878	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	486.159.336	461.070.480	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	41.266.607	87.266.607	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	41.266.607	87.266.607	
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	41.266.607	87.266.607	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	25.228.443.994	25.717.483.182	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	25.228.443.994	25.717.483.182	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	25.228.443.994	25.717.483.182	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.004.321.225	12.545.872.263	
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	335.887.683	335.887.683	
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	308.831.183	301.768.000	
3.26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.056.500	34.121.683	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.119.346.828	9.797.623.481	
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.514.070.974	8.286.685.627	
3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	590.357.834	496.019.834	
3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.918.020	14.918.020	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	889.884.600	606.452.200	
3.26.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.547.500	131.547.500	
3.26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.588.600	71.588.600	
3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	386.748.500	403.318.100	
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.433.000	109.433.000	
3.26.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.433.000	109.433.000	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.522.868.714	1.412.403.099	
3.26.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.735.860	12.735.860	
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.080.800	74.080.800	
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.436.072.054	1.325.586.439	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.860.400	254.072.800	
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.934.000	101.052.000	
3.26.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.036.400	140.110.800	
3.26.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.910.000	42.910.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	610.292.930	766.292.930	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	608.164.680	658.164.680	
3.26.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	275.851.000	275.851.000	
3.26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	32.313.680	32.313.680	
3.26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	200.000.000	350.000.000	
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	102.128.250	102.128.250	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	102.128.250	102.128.250	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	11.406.891.539	12.083.131.539	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	11.406.891.539	12.083.131.539	
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	9.324.610.600	9.950.850.600	
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.864.215.939	1.908.665.939	
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	218.065.000	223.615.000	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	99.444.600	99.444.600	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	99.444.600	99.444.600	
3.26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	99.444.600	99.444.600	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	107.493.700	228.741.860	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	107.493.700	228.741.860	
3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	-	121.248.150	
3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	79.735.900	79.735.900	
3.26.05.1.01.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	27.757.800	27.757.800	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	18.701.832.205	18.349.422.013	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	18.701.832.205	18.349.422.013	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	12.126.382.676	11.521.438.626	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.344.400.161	6.095.683.136	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	6.387.622.533	6.138.905.508	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alatiran, dan Sarana Pendukung Pertanian	6.387.622.533	6.138.905.508	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran	956.777.628	956.777.628	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	958.777.628	958.777.628	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.025.167.517	3.661.429.622	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	4.025.167.517	3.661.429.622	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	722.640.030	722.640.030	
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.254.150.944	2.890.413.049	
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	48.376.543	48.376.543	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	520.011.177	461.424.247	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	501.785.343	443.198.413	
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	170.829.850	154.142.650	
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	330.955.493	289.055.763	
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	18.225.834	18.225.834	
3.27.04.1.05.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	18.225.834	18.225.834	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	18.586.700	18.586.700	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	18.586.700	18.586.700	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18.586.700	18.586.700	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.218.217.121	1.284.312.921	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.218.217.121	1.284.312.921	
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.218.217.121	1.284.312.921	
2.08.3.27.0.06.02.0001	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN	643.761.399	643.761.399	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Kat
		Sabelum	Setelah	
1	2	3	4	5
	MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN			
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	304.299.473	304.299.473	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.404.432	78.404.432	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.350	2.000.350	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.655	6.000.655	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.755	2.000.755	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.000.875	50.000.875	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.401.797	18.401.797	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.726.081	141.726.081	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.171.450	97.171.450	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.554.631	44.554.631	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.168.960	84.168.960	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.145.765	29.145.765	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.987.520	48.987.520	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.035.675	6.035.675	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	239.461.926	239.461.926	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Bebas Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	44.306.675	44.306.675	
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	44.306.675	44.306.675	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	195.145.251	195.145.251	
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	195.145.251	195.145.251	
2.09.3.27.0.00.02.0002	UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN	6.031.698.130	6.284.233.988	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.559.599.650	456.179.200	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.070.740	51.070.740	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.267.150	4.267.150	
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.995.650	11.995.650	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.995.650	9.995.650	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.650	1.000.650	
3.27.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	3.145.650	3.145.650	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.665.990	20.665.990	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.000.355	300.000.355	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.000.355	105.000.355	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.000.000	195.000.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.224.628.655	105.108.105	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.192.755	72.192.755	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.252.150	31.252.150	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.126.093.650	1.863.200	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	472.098.480	703.634.338	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	472.098.480	703.634.338	
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	42.833.940	42.833.940	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	269.987.765	501.523.643	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	159.276.755	159.276.755	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	5.124.420.450	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	5.124.420.450	
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	0	5.124.420.450	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.857.315.753	1.843.589.053	
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.657.315.753	1.843.589.053	
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.020.488.079	1.206.848.079	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	887.216.979	472.448.079	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	109.100.192	109.100.192	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	87.393.676	87.393.676	
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	21.708.516	21.708.516	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	511.804.400	297.035.500	
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	511.804.400	297.035.500	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	27.812.600	27.812.600	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	27.812.600	27.812.600	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <8000 m3/Tahun	38.499.787	38.499.787	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <8000 m3/Tahun	38.499.787	38.499.787	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	297.365.100	698.484.000	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	297.365.100	698.484.000	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	150.000.000	374.918.900	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	147.365.100	323.577.100	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	35.906.000	35.906.000	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35.906.000	35.906.000	
3.28.06.1.01.06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	35.906.000	35.906.000	
2.11.3.28.0.00.02.0002	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN	83.755.700	83.755.700	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	73.076.700	73.076.700	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.284.200	37.284.200	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.494.400	2.494.400	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.714.800	13.714.800	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	830,00	830,00	
3.28.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.475.000	1.475.000	
3.28.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	2.640.000	2.640.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.130.000	14.130.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.792.500	35.792.500	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.042.500	16.042.500	
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.750.000	19.750.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	10.679.000	10.679.000	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	4.500.000	4.500.000	
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	4.500.000	4.500.000	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	6.179.000	6.179.000	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	6.179.000	6.179.000	
2.14.3.28.0.00.02.0003	UPTD KPHP UNIT III LINGGA	85.057.500	85.057.500	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	76.957.500	76.957.500	
3.28.01.1.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.586.500	52.586.500	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.000	1.999.000	
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.132.500	5.132.500	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.491.400	2.491.400	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.704.800	23.704.800	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	825,00	825,00	
3.28.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.497.400	1.497.400	
3.28.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	3.750.000	3.750.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.187.000	13.187.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.370.600	24.370.600	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500,00	500,00	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.728.000	4.728.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Kel
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.142.600	19.142.600	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.100.000	8.100.000	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2.700.000	2.700.000	
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	2.700.000	2.700.000	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	5.400.000	5.400.000	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	5.400.000	5.400.000	
2.11.3.28.0.00.02.0004	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG	85.605.903	85.605.903	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	95.805.903	95.805.903	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.400.303	56.400.303	
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.334.203	12.794.503	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.944.100	28.075.800	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.122.000	15.530.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.205.600	29.205.600	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.205.600	29.205.600	
2.11.3.28.0.00.02.0005	UPTD KPHP UNIT V NATUNA	143.908.615	143.821.915	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	135.619.365	135.532.655	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.672.255	44.672.255	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.021.000	2.021.000	
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.241.600	5.241.600	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tongga	2.503.300	2.503.300	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.246.100	13.246.100	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	984,30	984,30	
3.28.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.499.955	1.499.955	
3.28.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.950.000	4.950.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.226.000	14.226.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.847.100	90.860.400	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.074.400	20.074.400	
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.872.700	69.786.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.289.260	8.289.260	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2.900.656	2.900.656	
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	2.900.656	2.900.656	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Pertindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	5.388.604	5.388.604	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	5.388.604	5.388.604	
2.11.3.28.0.00.02.0006	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS	149.971.741	149.971.741	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	141.448.856	141.448.856	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.013.566	41.122.766	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.500	2.108.700	
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.153.000	5.153.000	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.460.100	2.460.100	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.392.000	9.392.000	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.262.956	2.262.956	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.920.000	4.920.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.826.000	14.826.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.433.300	100.324.100	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	999,10	999,10	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.433.400	19.324.200	
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.800	80.000.800	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.524.886	6.524.886	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2.892.036	2.892.036	
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	2.892.036	2.892.036	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Pertindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	5.632.850	5.632.850	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	5.632.850	5.632.850	
2.11.3.28.0.00.02.0007	UPTD KPHL UNIT II BATAM	88.528.216	88.528.216	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	80.578.216	80.578.216	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.487.456	39.487.456	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Seudah	
1	2	3	4	5
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.003.200	2.003.200	
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.335.500	5.335.500	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.496.100	2.496.100	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.014.800	15.014.800	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Celakan dan Penggandaan	911,70	911,70	
3.28.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	919,16	919,16	
3.28.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	2.772.000	2.772.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.035.000	10.035.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.090.760	41.090.760	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.840.760	19.840.760	
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.250.000	20.250.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.950.000	7.950.000	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2.700.000	2.700.000	
3.28.03.1.03.06	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	2.700.000	2.700.000	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	5.250.000	5.250.000	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	5.250.000	5.250.000	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	18.815.626.095	21.636.317.639	
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.815.626.095	21.636.317.639	
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.815.626.095	21.636.317.639	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.389.936.976	13.160.472.478	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387.878.000	411.788.751	
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	196.888.000	234.973.251	
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.990.000	176.815.500	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.864.911.935	9.483.145.947	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.415.969.195	8.983.203.207	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Kat
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.29.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	279.982.500	310.982.500	
3.29.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	168.960.240	168.960.240	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	135.381.245	119.065.745	
3.29.01.1.05.02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62.353.745	62.353.745	
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	73.027.500	58.712.000	
3.29.01.1.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.513.810.100	1.653.460.140	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.263.800	151.289.800	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.683.000	82.503.000	
3.29.01.1.08.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.400.000	78.166.000	
3.29.01.1.08.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.218.263.500	1.341.521.340	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.247.698.192	1.247.698.192	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.247.698.192	1.247.698.192	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.267.504	266.313.704	
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.907.504	209.646.904	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.600.000	33.600.000	
3.29.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.750.000	22.066.800	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1.089.822.868	1.089.822.868	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1.015.135.868	1.015.135.868	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1.015.135.868	1.015.135.868	
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	74.687.000	74.687.000	
3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	34.687.000	34.687.000	
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	40.000.000	40.000.000	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1.252.182.500	1.636.176.300	
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1.252.182.500	1.636.176.300	
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program	287.585.000	287.585.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	3
	Konservasi Energi			
3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	50.000.000	50.000.000	
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	914.597.500	1.298.591.300	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.073.883.751	5.749.845.892	
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	48.915.000	48.915.000	
3.29.06.1.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	13.915.000	13.915.000	
3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	35.000.000	35.000.000	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	47.515.000	68.500.000	
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	14.515.000	35.500.000	
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	33.000.000	33.000.000	
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	46.507.000	46.507.000	
3.29.06.1.05.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	13.507.000	13.507.000	
3.29.06.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	33.000.000	33.000.000	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu,	2.930.746.751	5.585.923.892	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	5
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			
3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat dan Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	798.234.000	798.234.000	
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2.132.512.751	4.787.689.892	
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.370.356.095	7.603.612.063	
3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.370.356.095	7.603.612.063	
3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.370.356.095	7.603.612.063	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	726.733.240	876.733.240	
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	726.733.240	876.733.240	
3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	726.733.240	876.733.240	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	4.694.131.466	5.100.455.958	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4.694.131.466	5.100.455.958	
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	74.131.466	74.131.466	
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.620.000.000	5.026.324.492	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	600.066.959	426.998.435	
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	600.066.959	426.998.435	
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	558.795.849	385.727.325	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	41.271.110	41.271.110	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.349.424.430	1.199.424.430	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.329.424.347	1.179.424.347	
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.329.424.347	1.179.424.347	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	20.000.083	20.000.083	
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	20.000.083	20.000.083	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	19.278.558.921	19.364.174.333	
3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.278.558.921	19.364.174.333	
3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.278.558.921	19.364.174.333	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.062.964.709	14.355.745.098	
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.000.000	273.356.624	
3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.000.000	134.356.624	
3.31.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.000.000	39.000.000	
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	100.000.000	
3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.325.648.477	9.232.204.123	
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.836.868.477	8.781.974.123	
3.31.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	488.760.000	470.230.000	
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	904.522.732	1.492.774.284	
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.178.500	457.178.500	
3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.149.640	85.149.640	
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000	65.000.000	
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	552.194.592	845.446.144	
3.31.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		40.000.000	
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.270.372.000	2.928.966.568	
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
3.31.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.000.000	175.000.000	
3.31.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.092.372.000	2.750.988.568	
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.421.600	428.421.500	
3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	290.681.500	340.681.500	
	atau Kendaraan Dinas Jabatan			
3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.740.000	87.740.000	
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.175.021.203	4.967.856.226	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	5.175.021.203	4.967.856.225	
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	200.000.000	200.000.000	
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	150.000.000	150.000.000	
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.300.000.000	3.042.835.022	
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.468.500.299	1.468.500.299	
3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	58.520.904	108.520.904	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	40.573.009	40.573.009	
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	40.573.009	40.573.009	
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	40.573.009	40.573.009	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	20.000.000	20.000.000	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	20.000.000	20.000.000	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	20.000.000	20.000.000	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	20.000.000	20.000.000	
3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	20.000.000	20.000.000	
3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pematapan Satuan Permukiman	20.000.000	20.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	364.644.027.435	368.614.713.319	
4.01.5.06.5.07.01.0000	Sekretariat Daerah	364.644.027.435	368.614.713.319	
4.01.0.00.0.00.01.0002	Biro Kesejahteraan Rakyat	135.568.000.346	143.554.241.757	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.064.741.204	3.057.811.160	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.846.100	84.845.500	
4.01.01.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84.846.100	84.845.500	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.449.500	23.449.500	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.449.500	23.449.500	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	690.828.700	690.762.200	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.331.200	99.328.700	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	591.497.500	591.433.500	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	908.840.000	932.817.500	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	331.403.500	307.383.000	
4.01.01.1.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	577.436.500	625.434.500	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.149.856.040	1.089.028.960	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.735.000	72.303.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.082.121.040	1.026.725.960	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.920.864	226.907.500	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	226.920.864	226.907.500	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	133.603.259.142	140.498.430.597	
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	120.648.266.742	125.674.636.286	
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	96.854.220.198	97.362.970.842	
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	23.794.046.544	28.311.065.444	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	12.100.126.900	13.957.583.411	
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	11.529.427.500	13.397.028.711	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	285.738.000	285.593.300	
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	284.961.400	284.961.400	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	854.866.600	854.810.900	
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	284.899.600	284.874.100	
4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	284.956.300	284.927.200	
4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	285.009.800	285.009.600	
4.01.06.5.07.01.0001	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.227.356.776	4.687.356.776	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.117.863.709	2.185.397.989	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000	100.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	144.784.000	136.824.000	
4.01.01.1.06.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	122.284.000	122.284.000	
4.01.01.1.06.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.500.000	18.540.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.222.869	541.727.029	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.500.000	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.970.500	93.829.080	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	30.000.000	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	30.000.000	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.500.000	16.500.000	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	20.000.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.500.000	6.200.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.752.369	342.897.969	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.838.920	26.838.920	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	16.374.120	16.374.120	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.464.800	10.464.800	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	939.285.240	939.285.240	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	48.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	890.285.240	890.285.240	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.722.680	418.722.680	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	290.856.600	290.856.600	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.000	6.100.000	
4.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000	5.000.000	
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.766.080	116.766.080	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.109.503.067	2.521.958.907	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	762.816.070	852.816.070	
4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	47.097.600	47.097.600	
4.01.03.1.01.02	Facilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	591.329.970	691.329.970	
4.01.03.1.01.03	Facilitasi Penataan Wilayah	114.188.500	114.188.500	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	736.184.891	932.526.331	
4.01.03.1.02.01	Facilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	92.222.600	85.770.400	
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	248.504.500	451.565.500	
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	395.457.791	395.190.431	
4.01.03.1.03	Facilitasi Kerja Sama Daerah	620.702.106	736.816.509	
4.01.03.1.03.01	Facilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	487.655.000	530.997.400	
4.01.03.1.03.02	Facilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	92.047.106	92.047.106	
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	61.000.000	113.772.000	
4.01.5.06.5.07.01.0005	Biro Pengadaan Barang/Jasa	3.302.824.482	3.302.824.482	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.975.861.089	2.971.966.089	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000	102.377.932	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	130.000.000	102.377.932	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	159.773.300	192.300.400	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	141.379.700	178.074.800	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.393.600	14.225.600	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	891.336.112	891.480.112	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.452.400	2.452.400	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.332.780	19.970.510	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.974.300	4.974.300	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.013.700	150.013.700	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.086.642	16.843.892	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.556.500	13.556.500	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.940.000	5.940.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	473.979.810	477.708.810	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.881.600	113.881.600	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	5.005.800	5.005.800	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.243.800	32.243.800	
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.632.000	76.632.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.261.223.250	1.279.790.322	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.965.500	3.965.500	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.800.000	28.800.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.244.457.750	1.243.024.822	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.546.827	592.145.723	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.211.827	197.710.723	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.480.000	44.480.000	
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	349.955.000	349.955.000	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	326.963.393	330.868.393	
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	47.969.445	47.969.445	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	26.075.739	26.075.739	
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	8.119.806	8.119.806	
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	13.773.900	13.773.900	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	181.392.782	181.392.782	
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	38.208.200	38.208.200	
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	130.918.732	130.918.732	
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12.265.850	12.265.850	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	97.801.166	101.505.166	
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	37.800.900	37.800.900	
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	9.800.266	13.705.266	
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	
4.01.5.06.5.07.01.0005	Biro Perekonomian dan Pembangunan	6.648.420.122	6.819.891.951	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.848.428.402	2.903.588.508	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	357.344.868	359.861.848	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	212.455.848	212.455.848	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	144.888.710	147.406.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	332.416.565	339.486.770	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.658.715	77.728.820	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	145.220.750	145.220.750	
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	116.537.200	116.537.200	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	874.000.891	934.851.751	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	280.525.878	235.615.380	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	86.813.897	90.924.600	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	508.661.115	608.311.771	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.485.000	128.427.828	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.485.000	128.427.828	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	832.072.288	855.702.312	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000	20.762.730	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	96.000.000	110.400.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	694.072.288	724.539.682	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.110.000	285.299.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	332.610.000	259.439.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	34.500.000	25.820.000	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.485.920.778	2.605.032.500	
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	831.031.890	968.631.890	
4.01.06.1.01.01	Facilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	658.033.240	793.533.240	
4.01.06.1.01.02	Facilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	172.998.650	172.998.650	
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	238.527.500	238.527.500	
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	61.680.270	61.680.270	
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	108.704.790	108.704.790	
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	68.162.440	68.162.440	
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1.419.361.388	1.398.973.110	
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Anaka Usaha	1.072.899.798	1.053.311.518	
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	346.661.592	346.661.592	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.311.069.942	1.311.069.942	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	714.234.696	714.234.696	
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	257.578.148	257.578.148	
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	167.229.648	167.229.648	
4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	289.426.900	289.426.900	
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	586.835.246	586.835.246	
4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	120.751.888	120.751.888	
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	125.339.900	125.339.900	
4.01.08.1.02.03	Facilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	350.743.448	350.743.448	
4.01.5.06.5.07.01.0008	Biro Organisasi	2.628.373.908	2.678.373.908	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.851.346.600	1.801.348.800	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.984.460	101.984.460	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	101.984.460	101.984.460	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	89.344.800	71.844.800	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84.344.800	84.344.800	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	7.500.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	576.155.366	688.677.890	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.430.782	55.430.782	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.213.330	12.213.330	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.453.200	13.453.200	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	494.058.054	506.580.878	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.561.178	222.978.554	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.561.178	222.978.554	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	646.744.096	646.744.096	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.620.000	46.620.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.124.096	600.124.096	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.556.700	168.116.700	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	166.556.700	168.116.700	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	877.027.306	877.027.306	
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	307.369.004	307.369.004	
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	81.132.000	81.132.000	
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	81.177.004	81.177.004	
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	145.050.000	145.050.000	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	569.658.302	569.658.302	
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	164.600.000	164.600.000	
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	81.436.000	81.436.000	
4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	81.225.000	81.225.000	
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tata laksana Pemerintahan	105.381.200	105.381.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
4.01.02.1.02.05	Facilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	137.026.102	137.026.102	
4.01.5.06.5.07.01.0009	Biro Administrasi Pimpinan	14.788.877.180	15.188.677.180	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.786.677.180	15.186.677.180	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	256.747.700	256.747.700	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	162.954.300	169.917.500	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.632.400	20.116.200	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.161.000	48.714.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	470.465.000	603.422.500	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	309.515.000	507.005.000	
4.01.01.1.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	160.950.000	188.417.500	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.089.009.828	1.332.071.018	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	143.301.500	97.279.100	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181.292.000	225.466.900	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	124.664.800	157.864.800	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	639.751.528	851.480.218	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	325.065.598	251.630.046	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	325.065.598	251.630.046	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.551.041.004	3.380.823.004	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000	20.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.283.500	131.947.500	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	281.502.000	232.200.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.983.255.504	2.998.675.504	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.858.140	137.493.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.800.000	84.183.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.100.000	53.910.000	
4.01.01.1.13	Facilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	2.940.809.553	3.240.808.553	
4.01.01.1.13.01	Penyediaan Materi Pimpinan	333.600.000	333.600.000	
4.01.01.1.13.02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	1.071.089.420	1.273.182.864	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1.536.220.133	1.634.126.689	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	5.793.580.361	5.893.580.361	
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2.754.380.718	2.836.380.718	
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.085.912.043	2.085.912.043	
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	953.287.600	971.287.600	
4.01.5.06.5.07.01.0011	Biro Hukum	3.546.000.413	3.617.673.067	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.887.457.500	1.839.559.408	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.908.000	13.908.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.908.000	13.908.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.875.000	150.875.000	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000	30.000.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.680.000	46.680.000	
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	74.195.000	74.195.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.072.764.600	1.072.764.600	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.041.700	88.041.700	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.922.200	15.922.200	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.946.000	19.946.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	933.844.700	933.844.700	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.872.500	510.014.408	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	10.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	541.872.500	494.014.408	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.047.400	92.047.400	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.047.400	77.047.400	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.868.642.913	1.878.073.649	
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.002.038.913	1.321.610.313	
4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	315.691.157	565.563.177	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	158.885.930	228.800.610	
4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	153.987.800	153.862.480	
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	373.492.026	373.364.046	
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	658.506.000	658.463.336	
4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	378.200.000	378.200.000	
4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	278.306.000	278.263.336	
4.01.05.05.07.01.0012	Biro Umum	192.916.374.210	208.567.874.210	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	192.916.374.210	208.567.874.210	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.612.548	104.612.548	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	104.612.548	104.612.548	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.983.432.894	68.013.914.028	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.039.706.558	63.198.775.892	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.476.352.000	3.367.764.000	
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	612.693.644	612.693.644	
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	315.972.096	315.972.096	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	102.602.000	102.602.000	
4.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	93.441.500	93.441.500	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	322.665.096	322.665.096	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.786.800.932	1.656.389.711	
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	143.365.000	143.365.000	
4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	707.837.336	707.837.336	
4.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	163.446.500	175.992.500	
4.01.01.1.03.05	Rakonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	116.835.000	116.835.000	
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	655.315.096	512.359.875	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.323.600.889	1.388.948.803	
4.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	221.045.848	221.045.848	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	366.574.096	450.100.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Kat
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	148.146.307	148.146.307	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	152.500.000	144.422.000	
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	279.300.048	279.300.048	
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	155.934.600	155.934.600	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.616.003.694	42.126.301.057	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.261.657.554	9.393.351.551	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	672.014.096	672.014.096	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.816.518.057	12.616.603.857	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	340.321.096	340.321.096	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	111.895.148	111.895.148	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.047.800.751	16.385.416.317	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.848.999.700	2.083.999.700	
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	423.385.544	423.385.544	
4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	93.313.648	119.313.648	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.953.231.053	24.052.731.053	
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.282.855.000	19.352.355.000	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	3.660.376.053	4.710.376.053	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.259.087.300	37.246.760.307	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	580.485.680	621.456.649	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.114.087.069	7.965.739.569	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.210.835.293	9.723.834.396	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.353.689.258	18.935.728.891	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.571.420.136	22.332.112.419	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	745.644.236	745.644.236	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.283.744.389	7.613.744.389	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	201.409.096	201.409.096	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.493.186.454	5.893.176.834	
4.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	864.585.421	895.285.324	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.982.850.540	8.982.850.540	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.739.938.210	2.992.257.076	
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	322.983.360	225.302.226	
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	276.249.850	351.249.850	
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	140.705.000	140.705.000	
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.000.000.000	2.275.000.000	
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahaan Sekretaris Daerah	7.214.108.207	7.423.852.683	
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.212.347.046	3.422.091.522	
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.360.466.136	2.360.466.136	
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	1.641.295.025	1.641.295.025	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.384.238.337	1.209.994.525	
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.384.238.337	1.209.994.525	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	160.118.857.860	159.931.497.860	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	160.118.857.860	159.931.497.860	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	160.118.857.860	159.931.497.860	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	83.800.976.158	81.830.091.818	
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.015.300.000	1.015.300.000	
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	222.575.000	222.575.000	
4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	272.575.000	272.575.000	
4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	222.575.000	222.575.000	
4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	25.000.000	
4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	272.575.000	272.575.000	
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.958.303.965	13.574.226.919	
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.642.807.965	12.180.460.919	
4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	766.496.000	843.766.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	3
4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250.000.000	250.000.000	
4.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	150.000.000	150.000.000	
4.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	150.000.000	150.000.000	
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.050.000.000	878.547.460	
4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	950.000.000	779.547.460	
4.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	100.000.000	
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.599.048.540	19.944.835.099	
4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	481.448.540	991.353.546	
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.006.600.000	7.711.258.400	
4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.111.000.000	8.822.111.600	
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000.000	2.419.912.553	
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.597.407.463	1.597.927.763	
4.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.597.407.463	1.597.927.763	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.793.700.000	7.015.257.400	
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.280.400.000	1.980.357.400	
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.513.300.000	5.034.900.000	
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.329.457.905	6.652.011.405	
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.807.550.000	3.098.896.000	
4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000	300.000.000	
4.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	200.000.000	171.872.500	
4.02.01.1.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.134.200.982	1.134.200.982	
4.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.887.716.923	1.956.941.923	
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	32.106.748.285	30.801.184.572	
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	31.406.748.285	30.101.184.572	
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut DPRD	500.000.000	500.000.000	
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	200.000.000	200.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Setelah	5
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	350.000.000	350.000.000	
4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	350.000.000	350.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	76.317.881.702	78.101.406.242	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2.118.315.260	2.107.412.260	
4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	409.500.000	409.500.000	
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	409.564.000	646.136.200	
4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	608.051.460	608.051.460	
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	691.199.800	443.724.600	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	745.692.700	200.000.000	
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	745.692.700	200.000.000	
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	15.475.000.000	16.492.111.700	
4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.650.000.000	1.319.625.000	
4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8.000.000.000	9.176.524.000	
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	2.885.000.000	3.212.000.000	
4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.940.000.000	2.783.962.700	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	28.523.092.063	28.521.528.063	
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	200.000.000	200.000.000	
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	28.323.092.063	28.321.528.063	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	29.455.781.679	30.780.354.219	
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	22.683.481.479	23.683.481.479	
4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	409.500.000	420.403.000	
4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	482.800.200	370.434.200	
4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5.880.000.000	6.306.035.540	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	PERENCANAAN	36.178.307.767	35.895.056.350	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	36.178.307.767	35.895.056.350	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	36.178.307.767	35.895.056.350	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.257.676.267	27.237.419.160	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	316.300.000	
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	203.600.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	49.300.000	
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	63.400.000	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.725.726.794	19.617.475.378	
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.816.341.794	18.846.294.378	
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	859.385.000	720.216.000	
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.000.000	39.140.000	
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	11.825.000	
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	66.348.000	43.848.000	
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	66.348.000	43.848.000	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.408.477.470	2.082.430.863	
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	68.141.100	68.141.100	
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000	100.000.000	
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	450.000.000	250.000.000	
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300.000.000	150.000.000	
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	163.360.000	144.615.000	
5.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000	33.095.130	
5.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	297.000.000	237.713.250	
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	774.567.900	693.457.713	
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	207.408.470	207.408.470	
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.060.283	572.622.520	
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.026.400	397.048.400	
5.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	11.033.883	175.574.120	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.036.005.720	2.998.662.899	
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.000.000	141.018.000	
5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.000.000	242.000.000	
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.603.005.720	2.600.644.599	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.371.580.000	1.608.080.000	
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	76.560.000	76.560.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	645.000.000	479.520.000	
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800.000.000	1.000.000.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	8.526.627.000	6.030.527.000	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3.476.128.000	4.386.338.348	
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1.073.689.500	992.417.010	
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	168.894.500	310.621.700	
5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	226.581.000	212.331.640	
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	548.192.500	543.899.343	
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.458.690.500	2.327.068.853	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.160.499.000	1.844.186.854	
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	624.595.800	874.840.800	
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	98.008.000	122.448.000	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	830.794.200	646.899.854	
6.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.284.002.500	2.627.110.190	
6.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	635.000.000	555.000.000	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.000.000	80.000.000	

Urutan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	65.000.000	65.000.000	
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	80.000.000	80.000.000	
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100.000.000	171.198.900	
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	300.000.000	148.801.100	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	550.000.000	675.000.000	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	220.000.000	180.214.500	
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	220.000.000	390.785.500	
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.000.000	94.000.000	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.109.002.500	1.397.110.190	
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.000.000	133.732.000	
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	500.000.000	545.343.511	
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	99.707.500	164.947.959	
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	130.000.000	375.844.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	299.295.000	177.242.720	
5.02	KEUANGAN	870.294.211.797	1.009.927.647.151	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	751.561.861.204	885.607.151.201	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	749.125.139.236	883.068.921.853	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.407.580.659	55.448.432.828	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000.000	806.254.200	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000	379.220.095	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	200.000.000	165.679.800	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000	83.206.782	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	178.177.523	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.764.119.362	31.440.531.123	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.196.287.362	28.928.983.323	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.117.832.000	2.117.832.000	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.000.000	100.000.000	
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyisipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	200.000.000	143.715.800	
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	150.000.000	150.000.000	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.818.364.785	1.059.622.570	
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaiannya Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	97.068.900	
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	600.000.000	539.500.000	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.118.364.785	423.053.670	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.872.519.818	3.201.629.818	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	89.510.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	150.000.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.000.000	186.000.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	200.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	25.000.000	
5.02.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000	114.600.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.536.519.818	1.911.519.818	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	525.000.000	525.000.000	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.346.805.600	2.818.778.305	
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.631.905.600	1.598.805.600	
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	190.000.000	260.573.206	
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000	613.929.089	
5.02.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	75.000.000	175.000.000	
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	271.670.430	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.337.783.192	14.407.783.192	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	200.000.000	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230.000.000	230.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.907.783.192	13.977.783.192	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.442.897.902	1.612.803.620	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	105.403.800	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	916.700.000	896.758.850	
5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	50.000.000	14.932.164	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	200.000.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.187.902	395.708.806	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	886.013.254.577	822.946.186.026	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.460.000.000	5.530.000.000	
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	400.000.000	330.000.000	
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	350.000.000	350.000.000	
5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	350.000.000	350.000.000	
5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	350.000.000	350.000.000	
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	400.000.000	400.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	450.000.000	450.000.000	
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	400.000.000	400.000.000	
5.02.02.1.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	150.000.000	220.000.000	
5.02.02.1.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	
5.02.02.1.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	150.000.000	220.000.000	
5.02.02.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	450.000.000	580.000.000	
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.249.999.992	2.269.999.992	
5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	350.000.000	290.000.000	
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	400.000.000	400.000.000	
5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000	
5.02.02.1.02.05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000	
5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	450.000.000	550.000.000	
5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	349.999.992	349.999.992	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.410.000.000	1.828.750.000	
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	500.000.000	628.750.000	
5.02.02.1.03.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	200.000.000	200.000.000	
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	310.000.000	310.000.000	
5.02.02.1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	250.000.000	340.000.000	

Unsur Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.02.02.1.03.10	Penyusunan Pelunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	150.000.000	150.000.000	
5.02.02.1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		200.000.000	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.925.000.000	2.375.000.000	
5.02.02.1.04.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	150.000.000	150.000.000	
5.02.02.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	100.000.000	100.000.000	
5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	650.000.000	650.000.000	
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	400.000.000	400.000.000	
5.02.02.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100.000.000	100.000.000	
5.02.02.1.04.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	150.000.000	150.000.000	
5.02.02.1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100.000.000	300.000.000	
5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	150.000.000	150.000.000	
5.02.02.1.04.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	125.000.000	375.000.000	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	673.278.254.585	809.302.435.033	
5.02.02.1.05.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	350.000.000	350.000.000	
5.02.02.1.05.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	13.291.911.555	13.291.911.555	
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyakuran Bantuan Keuangan	7.400.000.000	8.400.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.000.000.000	6.685.444.665	
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	642.236.343.030	780.575.078.819	
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	700.000.000	1.520.000.000	
5.02.02.1.06.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	200.000.000	770.000.000	
5.02.02.1.06.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	500.000.000	750.000.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.704.304.000	4.674.304.000	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.704.304.000	4.674.304.000	
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	436.800.000	580.485.000	
5.02.03.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	180.000.000	180.000.000	
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	200.000.000	300.000.000	
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	452.294.000	452.294.000	
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	610.000.000	851.072.000	
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	820.800.000	998.255.250	
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	297.504.000	297.504.000	
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	327.777.750	
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	500.000.000	500.000.000	
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	206.906.000	206.906.000	
5.02.0.00.0.00.02.0001	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET	1.851.841.968	1.963.229.348	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.851.841.968	1.963.229.348	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	856.685.240	896.532.820	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	60.000.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.500.000	156.387.380	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	50.000.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	472.185.240	395.145.240	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	931.656.728	882.657.128	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.000.000	340.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	551.656.728	542.657.128	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.500.000	374.039.600	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	4.000.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	150.649.600	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.500.000	69.390.000	
5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	
5.02.0.00.0.00.02.0002	UPT DANA BERGULIR	585.000.000	585.000.000	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	125.000.000	125.000.000	
5.02.01.1.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.000.000	125.000.000	
5.02.01.1.08.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000	125.000.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	480.000.000	480.000.000	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	60.000.000	60.000.000	
5.02.02.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LQ, dan Beban	60.000.000	60.000.000	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	400.000.000	400.000.000	
5.02.02.1.05.06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	400.000.000	400.000.000	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	118.732.230.593	124.320.496.960	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	103.930.612.628	109.222.876.454	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	95.804.135.644	100.956.639.523	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	760.862.891	842.563.501	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	163.234.603	282.886.092	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.178.500	37.274.500	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	528.269.788	522.992.909	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.521.864.686	79.534.872.242	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.052.127.995	37.124.921.816	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.427.873.201	42.380.834.046	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.763.500	29.116.380	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	208.119.892	208.234.641	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	208.119.892	208.234.641	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	815.257.812	775.665.812	
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	96.000.000	121.832.800	
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	284.114.000	253.842.000	
5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	317.403.512	311.596.012	
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	118.740.300	86.415.000	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	570.127.200	478.098.900	
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	129.720.000	112.199.700	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	288.968.700	235.498.700	
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	151.440.500	130.400.500	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.263.759.660	6.375.117.666	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.177	86.056.250	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.334.661.921	1.421.879.152	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	89.225.300	335.516.680	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	447.141.254	418.531.254	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.876.034.437	2.728.541.337	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	49.920.000	49.920.000	
5.02.01.1.06.08	Facilitas Kunjungan Tamu	250.091.000	194.250.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	864.145.879	960.183.000	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	182.239.892	182.239.892	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.681.475.008	1.686.101.260	
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.801.908	108.260.100	
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	801.044.567	854.913.747	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	789.628.533	722.927.413	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.597.818.400	7.550.142.648	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.911.700	19.911.700	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.706.245.000	2.637.160.000	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.811.700	136.811.700	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.737.850.000	4.756.459.148	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.384.030.385	3.505.823.054	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penginapan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	851.482.964	959.203.472	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	494.676.192	494.876.192	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.037.871.229	2.051.943.390	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	668.932.351	577.377.070	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	285.327.500	169.740.500	
5.02.02.1.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	285.327.500	169.740.500	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	233.605.000	257.637.000	
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	233.605.000	257.637.000	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	149.999.851	149.999.670	
5.02.02.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	149.999.851	149.999.670	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.457.644.633	7.688.861.851	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.457.644.633	7.688.861.851	
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	973.065.288	991.605.288	
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.093.974.388	1.093.974.388	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.166.474.096	1.216.224.896	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	343.558.096	430.208.856	
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.181.786.700	1.181.786.700	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	330.159.687	318.691.954	
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	400.000.000	400.000.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	545.855.246	667.639.246	
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	553.237.048	411.777.709	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	533.121.848	640.642.588	
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	236.312.236	236.312.236	
5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100.000.000	100.000.000	
5.02.0.00.0.00.03.0001	UPT PPD BATAM CENTRE	4.091.663.591	4.241.663.591	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.694.397.868	2.038.869.732	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	75.108.200	75.108.200	
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.108.200	75.108.200	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	671.469.518	978.977.318	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.012.300	4.486.700	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.464.400	288.000.500	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.523.000	5.439.600	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	234.741.700	217.259.900	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	226.433.830	213.754.330	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.119.000	7.119.000	
5.02.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	3.892.000	592.00	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.273.288	242.315.288	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.884.960	186.654.960	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.159.000	4.159.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.166.960	121.166.960	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.559.000	61.359.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	761.945.210	798.089.264	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	730.386.210	786.530.254	
5.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.559.000	31.559.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.197.266.703	2.202.803.869	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.197.285.703	2.202.803.859	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	598.974.300	612.564.300	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	107.199.655	107.099.655	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	707.352.176	698.192.832	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	783.739.572	784.947.072	
5.02.0.00.0.00.03.0002	UPT PPD Tanjungpinang	2.318.704.482	2.408.854.705	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.176.713.808	1.261.459.623	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	33.063.800	33.063.800	
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.063.800	33.063.800	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.110.581	446.762.328	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.974.850	8.340.400	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.589.343	55.559.343	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.985.500	78.217.900	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.864.344	43.424.069	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.002.500	6.002.500	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.002.500	6.002.500	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.691.544	249.215.614	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.549.656	255.002.656	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.747.000	1.500.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.156	250.000.156	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.802.500	3.502.500	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.989.871	526.830.841	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.585.200	250.585.200	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.940.000	14.940.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.464.671	261.105.841	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.139.990.574	1.145.395.082	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.139.990.574	1.145.395.082	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	239.703.144	245.242.652	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	84.999.773	84.999.773	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sabelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	593.237.313	593.102.313	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	222.050.344	222.050.344	
5.02.0.00.0.00.03.0003	UPT PPD BINTAN	1.827.738.943	1.827.738.943	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	856.347.871	856.347.871	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000	10.000.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.108.779	304.353.168	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.208.400	7.208.400	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.947.884	64.137.948	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.486.482	31.486.482	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.987.200	76.990.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.899.813	50.051.338	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	3.000.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	1.188.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.479.000	70.291.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.000.500	116.088.450	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.500	8.700.500	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000	106.385.950	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.238.582	426.908.262	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.272.400	170.272.400	
5.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.670.000	29.670.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.096.182	226.765.862	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	771.391.072	771.391.072	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	771.391.072	771.391.072	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	342.480.896	342.480.896	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	80.000.000	80.000.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	142.256.648	142.256.648	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	206.653.528	206.653.528	
5.02.0.00.0.00.03.0004	UPT PPD KARIMUN	1.606.892.744	1.698.526.897	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sabelum	Seudah	
1	2	3	4	5
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	902.385.163	972.860.084	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.055.246	383.028.535	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.367.500	7.367.500	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.971.800	22.987.743	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.219.254	7.069.900	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.119.300	71.119.300	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.845.700	24.770.100	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bagan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.527.800	3.943.900	
5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.388.700	3.178.800	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.617.192	222.609.192	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.283.415	286.456.560	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.371.700	3.153.900	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.000.015	285.302.660	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.651.202	321.378.989	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.410.000	77.410.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.230.000	53.645.098	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.011.202	190.321.893	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	603.607.661	625.665.613	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	603.607.661	625.665.613	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	309.358.701	309.358.701	
5.02.04.1.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	49.988.966	49.988.966	
5.02.04.1.01.10	Pengalihan Pajak Daerah	114.436.114	136.594.146	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	129.723.800	129.723.800	
5.02.0.00.0.00.03.0005	UPT PPD LINGGA	1.181.317.140	1.150.061.508	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	589.833.304	549.088.872	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.355.610	13.635.000	
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.355.610	13.635.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.794.642	337.081.516	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Kat
		Sabelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.198.918	7.235.300	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.033.634	20.322.000	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.219.837	28.895.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.547.200	54.878.400	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.899.848	19.596.818	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.999.852	3.840.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.995.500	15.201.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.799.055	187.115.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.587.151	80.189.260	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	1.899.855	3.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.590.196	51.482.560	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	9.997.100	5.726.700	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.095.901	138.184.096	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.200.000	51.200.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.420.000	20.510.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.475.901	66.474.096	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	611.483.836	600.991.636	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	611.483.836	600.991.636	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	149.400.996	120.652.496	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	125.816.098	148.788.088	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	149.345.944	164.313.644	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	186.920.800	169.337.400	
5.02.0.00.0.00.03.0006	UPT PPD NATUNA	1.208.116.845	1.208.116.549	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	603.528.001	603.527.905	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.635.500	8.635.500	
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.635.500	8.635.500	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	483.488.547	601.583.298	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.848.000	4.848.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.228.900	25.556.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Kat
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.605.051	10.622.200	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.918.500	51.918.500	
5.02.01.1.08.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.778.000	30.778.000	
5.02.01.1.08.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.920.000	640.00	
5.02.01.1.08.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	6.970.000	6.970.000	
5.02.01.1.08.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.230.096	370.230.096	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.999.950	75.516.405	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.999.950	72.516.405	
5.02.01.1.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.394.004	217.812.704	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.760.000	77.410.000	
5.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.880.000	17.880.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.754.004	122.522.704	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	404.588.644	404.588.644	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	404.588.644	404.588.644	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	80.438.000	80.438.000	
5.02.04.1.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	61.010.000	61.010.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	187.692.144	187.692.144	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	75.448.500	75.448.500	
5.02.00.0.00.03.0007	UPT PPD ANAMBAS	555.439.999	555.439.193	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	301.797.807	301.797.001	
5.02.01.1.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.378.948	190.236.548	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.984.000	2.984.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.818.100	29.818.100	
5.02.01.1.08.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.811.900	19.811.900	
5.02.01.1.08.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	4.655.500	4.655.500	
5.02.01.1.08.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.957.048	132.957.048	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.974.765	64.043.405	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Kat
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.494.000	1.494.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.480.765	62.549.405	
5.02.01.1.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.840.484	47.517.048	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.710.000	10.710.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.570.000	3.570.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.560.494	33.237.048	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	253.842.192	253.842.192	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	253.842.192	253.842.192	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	19.950.000	19.950.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	117.474.096	117.474.096	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	116.218.096	116.218.096	
5.02.0.00.0.00.03.0006	UPT PPD BATU AJI	1.149.147.138	1.143.807.606	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	679.474.154	673.011.630	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.690.654	11.332.530	
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.690.654	11.332.530	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.357.306	224.262.905	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.487.309	4.487.309	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.691.985	14.691.985	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.960.758	1.384.358	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.133.300	51.625.300	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.740.500	21.740.500	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.160.309	2.160.309	
5.02.01.1.06.08	Facilitas Kunjungan Tamu	4.980.000	4.980.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.203.144	123.203.144	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.433.898	186.433.898	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.900.309	1.900.309	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.132.980	169.132.980	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.400.309	14.400.309	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	251.982.587	251.982.587	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Daerah			
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	47.630.000	47.630.000	
	Operasional atau Lapangan			
5.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.940.000	4.940.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.422.597	199.422.597	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	469.672.984	470.595.976	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	469.672.984	470.595.976	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	49.880.300	47.430.300	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	174.419.592	167.095.584	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	165.698.692	196.405.692	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	59.684.400	59.664.400	
5.02.0.00.0.00.03.0009	UPT PPD KIJANG	578.882.086	578.844.837	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	368.626.690	404.527.840	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	9.823.600	9.823.600	
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.823.600	9.823.600	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.557.494	161.538.844	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.498.800	4.166.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.605.643	6.605.643	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.359.151	1.513.751	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.188.800	54.757.300	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.989.400	20.603.700	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.477.700	1.158.550	
5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.991.000	2.991.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.437.000	69.744.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.943.300	86.743.300	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.996.500	1.996.500	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.990.800	71.990.800	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.956.000	12.756.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.302.296	146.420.396	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	69.996.900	69.996.900	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.950.000	9.950.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.355.398	68.474.096	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	210.225.398	174.316.997	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	210.225.398	174.316.997	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	39.974.100	35.870.101	
5.02.04.1.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	24.942.600	12.942.600	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	105.309.298	105.309.298	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	39.999.400	20.195.000	
5.02.0.00.0.00.03.0010	UPT PPD TANJUNG BATU	586.745.197	586.744.887	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	327.949.353	370.580.686	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	7.759.400	7.759.400	
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.759.400	7.759.400	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.520.487	207.191.090	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.207.300	4.207.300	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.297.500	13.225.300	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.651.728	7.713.834	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.498.800	31.450.800	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.997.559	33.889.258	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.995.500	1.995.500	
5.02.01.1.06.08	Facilitas Kunjungan Tamu	2.990.100	1.475.100	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.882.000	119.234.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.753.170	42.008.100	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.958.100	1.958.100	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.998.370	38.440.000	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.806.700	1.610.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.906.298	113.822.098	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.920.000	42.028.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
5.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	5.120.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.986.296	66.474.096	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	258.795.844	216.164.181	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	258.795.844	216.164.181	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	35.088.100	18.832.400	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	35.089.889	11.060.800	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	138.628.655	138.500.981	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	49.989.200	49.970.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	16.776.557.334	17.457.472.649	
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Korpri	16.776.557.334	17.457.472.649	
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Korpri	16.776.557.334	17.457.472.649	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.980.343.020	15.015.058.335	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.152.200	139.652.200	
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	135.152.200	139.652.200	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.812.769.224	12.858.704.539	
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.368.217.224	12.314.132.539	
5.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	494.572.000	487.632.000	
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	56.940.000	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.500.000	2.500.000	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	564.577.500	790.447.300	
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.308.000	11.314.000	
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.130.000	122.809.300	
5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	25.000.000	
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.445.300	37.445.300	
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.494.200	18.494.200	
5.03.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	41.249.000	60.573.500	
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	318.951.000	518.711.000	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	890.324.096	890.324.096	
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	25.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Kat
		Sabelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	30.000.000	
5.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	48.000.000	
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	787.324.096	787.324.096	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.000.000	333.430.200	
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	430.000.000	301.657.100	
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	20.000.000	
5.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	11.773.100	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.796.214.314	2.442.414.314	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	280.750.890	480.750.890	
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	160.000.000	330.000.000	
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	20.692.050	20.692.050	
5.03.02.1.01.08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	36.549.240	56.549.240	
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	41.930.900	51.930.900	
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	21.578.700	21.578.700	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	444.983.000	884.983.000	
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	175.000.000	295.000.000	
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	94.983.000	94.983.000	
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	175.000.000	475.000.000	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	824.392.720	835.582.720	
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	313.887.864	313.887.864	
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	459.770.256	459.770.256	
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	50.734.600	51.934.600	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	246.087.704	261.087.704	
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	61.446.327	61.446.327	
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	57.868.310	57.868.310	
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	83.339.767	88.339.767	
5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	43.413.300	53.413.300	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	16.844.180.239	17.519.707.003	
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	16.844.180.239	17.519.707.003	
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	16.844.180.239	17.519.707.003	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.988.473.601	15.663.616.874	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	PROVINSI			
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.630.500	148.389.400	
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.659.200	104.246.100	
5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.971.300	44.143.300	
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.091.631.011	9.938.222.737	
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.873.875.011	9.714.218.737	
5.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	217.756.000	222.004.000	
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.404.500	360.231.500	
5.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	138.404.500	138.404.500	
5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		221.827.000	
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	778.558.262	1.054.675.608	
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.274.600	17.088.600	
5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.986.000	25.851.455	
5.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.493.550	1.493.550	
5.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.643.712	104.833.810	
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.456.300	38.265.532	
5.04.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	21.436.000	55.278.000	
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	586.268.100	811.858.861	
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.979.229.664	2.009.079.773	
5.04.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	813.305.500	813.305.500	
5.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	592.606.964	592.177.003	
5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	573.318.200	603.597.270	
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	910.813.984	878.369.636	
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.417.600	13.315.200	
5.04.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	48.000.000	
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	807.396.384	817.054.336	
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	993.205.650	1.276.648.320	
5.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	483.698.800	340.195.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Kat
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
5.04.01.1.09.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.980.000	14.980.000	
5.04.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	494.546.880	550.580.840	
5.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	370.912.080	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.856.706.638	1.856.090.129	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	670.000.000	670.000.000	
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Intl. dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	670.000.000	670.000.000	
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.186.706.638	1.186.090.129	
5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	75.000.000	75.000.000	
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	400.000.000	405.588.000	
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	710.706.638	705.502.129	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	722.350.000	897.350.000	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	722.350.000	897.350.000	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	722.350.000	897.350.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	722.350.000	897.350.000	
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	320.650.000	395.650.000	
5.05.02.1.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	320.650.000	395.650.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	221.700.000	230.252.000	
5.05.02.1.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	221.700.000	230.252.000	
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	180.000.000	271.448.000	
5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	90.000.000	181.448.000	
5.05.02.1.04.05	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	90.000.000	90.000.000	
5.06	PENGLOLAAN PERBATASAN	10.037.930.650	8.992.545.322	
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	10.037.930.650	8.992.545.322	
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	10.037.930.650	8.992.545.322	
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.194.381.993	7.869.026.033	
5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.644.400	130.644.400	
5.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.648.500	80.648.500	
5.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.995.900	49.995.900	
5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.067.664.710	5.735.027.750	
5.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.839.180.710	5.506.653.750	
5.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	228.374.000	228.374.000	
5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.005.200	51.660.400	
5.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58.005.200	51.660.400	
5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	662.136.578	738.695.445	
5.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	89.287.135	74.074.635	
5.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.731.843	55.790.808	
5.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	118.895.700	97.617.500	
5.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000	24.000.000	
5.06.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	15.490.400	20.901.102	
5.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	388.731.500	466.311.400	
5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	741.700.422	717.694.198	
5.06.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	449.121.622	446.800.000	
5.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	3.625.600	9.064.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	288.953.200	261.830.198	
5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.022.040	412.622.040	
5.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.369.000	4.369.000	
5.06.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.427.500	48.427.500	
5.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	939.225.540	380.025.540	
5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.308.643	76.481.600	
5.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.363.243	73.536.400	
5.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.945.400	2.945.400	
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	843.548.657	1.129.619.289	
5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	323.868.657	609.938.289	
5.06.02.1.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	200.000.000	486.070.832	
5.06.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	123.868.657	123.868.657	
5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	275.000.000	275.000.000	
5.06.02.1.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	85.000.000	85.000.000	
5.06.02.1.02.02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	70.000.000	70.000.000	
5.06.02.1.02.03	Fasilitasi Penegakan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	50.000.000	50.000.000	
5.06.02.1.02.04	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	70.000.000	70.000.000	
5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	244.680.000	244.680.000	
5.06.02.1.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	84.680.100	84.680.100	
5.06.02.1.03.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	80.000.000	79.900.000	
5.06.02.1.03.03	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	79.999.900	79.999.900	
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	17.120.073.896	18.498.830.078	
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Daerah	17.120.073.895	18.498.830.078	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.07.00.00.01.0000	Badan Penghubung Daerah	17.120.073.895	18.498.830.076	
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.887.368.186	8.122.151.150	
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	212.376.000	291.590.000	
5.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	70.000.000	
5.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	142.376.000	173.376.000	
5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	48.214.000	
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.297.888.309	3.378.914.702	
5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.063.066.799	3.137.083.182	
5.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199.821.510	199.821.510	
5.07.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.000.000	42.000.000	
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	289.189.881	289.189.881	
5.07.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	188.412.732	188.412.732	
5.07.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.756.949	100.756.949	
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.467.675	497.467.675	
5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	450.467.675	497.467.675	
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.716.950	83.112.950	
5.07.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	65.716.950	63.112.950	
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.869.300.579	2.011.030.359	
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	608.235.779	545.235.779	
5.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	474.670.050	474.670.050	
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	786.394.750	991.124.540	
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.502.448.972	1.590.865.783	
5.07.01.1.09.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.070.372.510	1.070.372.510	
5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	407.866.522	520.493.273	
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	9.432.705.729	10.376.678.918	
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	9.432.705.729	10.376.678.918	
5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	5.192.857.260	5.685.056.567	
5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1.183.786.195	1.258.746.137	
5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni	1.100.000.000	1.176.813.940	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Budaya			
5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.956.062.274	2.256.062.274	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	36.000.000.000	36.099.354.350	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	36.000.000.000	36.099.354.350	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	36.000.000.000	36.099.354.350	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.636.756.679	29.600.969.307	
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.996.400	144.996.400	
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.008.200	75.008.200	
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.988.200	69.988.200	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.082.674.304	22.081.276.354	
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.408.507.304	21.391.317.354	
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	447.424.000	463.216.000	
6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	226.743.000	226.743.000	
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000	65.525.800	
6.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	40.525.800	
6.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000	25.000.000	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.138.383.535	1.373.103.190	
6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	106.779.354	126.833.750	
6.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	79.804.400	85.542.400	
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	748.999.781	945.944.000	
6.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	214.783.040	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.642.063.840	3.985.270.248	
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.020.500	60.020.500	
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000	292.730.700	
6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.397.500	30.397.500	
6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	490.073.000	566.337.000	
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	288.000.000	293.247.000	
6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	71.432.900	
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.354.656.240	2.559.914.240	
6.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	101.069.000	82.190.408	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	796.859.000	118.407.700	
6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	163.543.000	118.407.700	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	864.100.000	809.310.000	
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	25.000.000	
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	60.210.000	
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	779.100.000	724.100.000	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909.839.800	1.043.079.615	
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	297.510.000	374.995.800	
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	311.295.000	387.249.415	
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.834.800	100.834.600	
6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.946.595.455	4.722.683.230	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.246.162.430	3.414.031.030	
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	499.999.730	582.712.980	
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	898.955.000	734.955.000	
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	24.999.600	24.999.600	
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	119.998.100	76.037.100	
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	249.996.800	295.921.400	
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	1.250.000.000	1.262.884.800	
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	401.213.200	456.520.140	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.700.433.025	1.308.652.200	
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah	34.999.725	56.186.800	
6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.665.433.300	1.252.465.300	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.416.647.666	1.775.701.813	
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	752.499.858	855.357.655	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Fasilitasi Pengawasan			
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	352.499.709	442.588.406	
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	400.000.149	412.769.249	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	684.148.008	920.344.168	
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	247.151.048	247.137.788	
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	75.000.000	86.700.000	
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	141.997.100	379.906.510	
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	199.999.860	206.599.860	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	45.432.392.288	125.290.143.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.432.392.288	125.290.143.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.432.392.288	125.290.143.621	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.497.738.060	13.024.165.648	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.585.349	452.270.632	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	193.585.349	386.270.632	
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.000.000	66.000.000	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.273.457.373	7.422.792.306	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.773.513.373	6.872.808.308	
8.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	499.944.000	549.984.000	
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.119.215	58.563.075	
8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.444.215	55.444.215	
8.01.01.1.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.675.000	3.118.860	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.049.786.329	1.646.783.862	
8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.956.685	61.927.531	
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.012.400	102.403.065	
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	30.789.343	
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	858.126.164	1.372.019.343	
8.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.722.610	9.624.010	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	69.948.470	70.020.570	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.009.194	1.100.551.825	
8.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.009.194	1.100.551.825	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.462.722.988	2.099.870.763	
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.922.988	778.304.163	
8.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	39.600.000	
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.284.800.000	1.281.966.600	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.077.622	243.353.185	
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.140.622	214.153.185	
8.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.937.000	29.200.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.371.864.197	1.398.843.430	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.371.864.197	1.398.843.430	
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	131.771.988	131.771.988	
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.172.976.642	1.172.976.642	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Kel
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	67.115.567	94.094.800	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	7.415.625.500	83.458.583.900	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	7.415.625.500	83.458.583.900	
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.295.600.000	23.377.164.900	
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.932.268.000	59.893.651.900	
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	187.757.500	187.767.100	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	5.740.282.500	5.868.561.485	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.740.282.500	5.868.561.485	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	396.458.200	396.458.200	
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5.289.333.300	5.407.613.300	
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	54.491.000	54.489.985	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.582.467.693	1.620.612.693	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.582.467.693	1.620.612.693	
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	238.345.000	
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	104.067.570	104.067.570	
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.426.651.090	1.426.651.090	
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan	51.749.033	51.749.033	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	18.824.414.348	19.729.156.465	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	18.824.414.348	19.729.156.465	
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	112.974.548	112.974.548	
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15.136.515.500	16.336.709.617	
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	78.865.400	89.105.400	
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	3.496.058.900	3.190.366.900	

Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 tercantum pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.2

Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Tidak Terduga, Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Plafon Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	1.175.949.890.862	1.147.480.359.364
2	Belanja Barang dan Jasa	1.485.540.448.194	1.446.578.335.348
3	Belanja Bunga	13.141.911.555	13.141.911.555
4	Belanja Subsidi	1.000.000.000	5.409.750.000
5	Belanja Hibah	254.010.544.201	382.068.142.191
6	Belanja Bantuan Sosial	798.572.000	8.280.822.000
7	BELANJA MODAL	581.585.471.186	660.733.870.176
	Belanja Modal Tanah	1.550.000.000	3.950.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.364.802.004	206.562.012.972
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.075.983.371	264.028.059.194
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	170.672.908.421	183.375.234.432
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	508.542.980	533.756.588
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.393.255.010	2.284.807.010
8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	6.685.444.685
9	Belanja Bagi Hasil	642.236.343.030	780.575.078.813
10	Belanja Bantuan Keuangan	7.400.000.000	8.400.000.000
	TOTAL	4.151.843.181.028	4.459.353.714.110

BAB IV
PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 tercantum pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan		Dasar Hukum
		Sebelum	Sesudah	
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216.566.292.010	405.506.584.882	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.000.000.000	388.950.302.882	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	16.556.292.010	16.556.292.010	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	216.556.292.010	405.506.584.892	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	84.338.838.445	66.152.600.539	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	84.338.838.445	66.152.600.539	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	84.338.838.445	66.152.600.539	
	Pembiayaan Netto	132.217.453.565	339.353.984.353	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman pada RKPD Tahun 2023 yang telah disinergikan dengan RKPD Perubahan Tahun 2023. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 berisikan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program pembangunan daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disepakati antara Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan kegiatan dan pagu anggaran definitif yang dilaksanakan ketika proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS, yang secara substansi disampaikan dalam Pengantar Nota Keuangan Gubernur.

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.